



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025



2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP

Prepared By :

Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Sumbawa



Dislutkan.sumbawakab.go.id



dislutkan@sumbawakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 dapat disusun dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan LKJIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa selama Tahun Anggaran 2025, serta sebagai implementasi dari prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penyusunan laporan ini juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja, serta evaluasi terhadap keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.

Sepanjang Tahun 2025, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, produksi usaha kelautan dan perikanan, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang memerlukan perhatian dan perbaikan di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan laporan kinerja di masa mendatang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKJIP ini.

Akhirnya, semoga LKJIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja serta kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Sumbawa Besar, 2026
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa,



RAHMAT HIDAYAT, S.Pi., MT
Pembina TK.1 (IV/b)
NIP. 19730418 200003 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	2
1.3. Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan	4
1.4. Sumber Daya Manusia Aparatur dan Sarana Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa	15
1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa	24
1.6. Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	30
2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan	30
2.2. Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	34
2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.....	35
2.4. Instrumen Pendukung Pengukuran Capaian Kinerja	36
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA.....	40
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025	42
A. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025	47
B. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan 2023	55
C. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2029	57
D. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kinerja Provinsi Dan Target Nasional Tahun 2024	57
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan ...	58
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Tahun 2025	62
G. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	78
3.2. Realisasi Anggaran	85
BAB IV PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa..	4
Tabel 1.2	Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa	13
Tabel 1.3	Karakteristik Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024	15
Tabel 1.4	Analisis beban kerja Dinas Kelautan dan Perikanan	19
Tabel 1.5	Daftar Inventaris Tanah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024.....	20
Tabel 1.6	Daftar Inventaris Tanah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024.....	20
Tabel 1.7	Daftar inventaris peralatan dan mesin pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang diadakan pada tahun 2020-2024	22
Tabel 1.8	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.....	25
Tabel 1.9	Isu Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.....	27
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa 2025-2029	31
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.....	35
Tabel 3.1	Kriteria Realisasi/Tingkat Capaian Kinerja	41
Tabel 3.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026	43
Tabel 3.3	Penetapan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029	44
Tabel 3.4	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026	47
Tabel 3.5	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029	47
Tabel 3.6	Komponen Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	48
Tabel 3.7	Rekomendasi dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Atas Capaian Penilaian Akuntabilitas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.....	49
Tabel 3.8	Realisasi Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2025	51
Tabel 3.9	Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 – 2025....	53
Tabel 3.10	Komposisi Produksi Perikanan Tahun 2022 - 2024	53
Tabel 3.11	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan 2023	55

Tabel 3.12	Pembandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra Tahun 2025-2029	57
Tabel 3.13	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Kinerja Provinsi Dan Target Nasional Tahun 2024	58
Tabel 3.14	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	59
Tabel 3.15	Program dan Kegiatan Sasaran Strategis Untuk Indikator Kinerja Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan	61
Tabel 3.16	Proporsi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan.....	62
Tabel 3.17	Efisiensi Penggunaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	64
Tabel 3.18	Analisis Beban Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	77
Tabel 3.19	Analisis Capaian Program Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 ..	79
Tabel 3.20	Realisasi Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	85
Tabel 3.21	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.....	3
Gambar 1.2	Struktur Organisasi UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tipe A.....	15
Gambar 1.3	Rata-rata Proporsi Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa Tahun 2020-2024.....	17
Gambar 1.4.	Komposisi Pegawai ASN dan Non-ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbawa Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024 ...	17
Gambar 1.5	Rata-rata Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Kelompok Usia	18
Gambar 1.6.	Rata - rata komposisi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024	18
Gambar 2.1.	Keselaran antara tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2025-2029 dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025-2029	31
Gambar 2.2.	Aplikasi E-SAKIP Sumbawa.....	37
Gambar 2.3.	Aplikasi E-KINERJA BKN	38
Gambar 2.4.	Aplikasi ESR MENPAN	39
Gambar 3.1.	Produksi Perikanan Tahun 2021-2026	50
Gambar 3.2.	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Penyerahan Bantuan Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025	62

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Memiliki Peran Strategis dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Sumbawa. Peran ini menjadikan Dinas Kelautan dan Perikanan Sebagai Salah Satau Penunjang dalam pelaksanaan Visi

Pembangunan Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 yaitu: **“Terwujudnya Sumbawa Unggul, Maju dan Sejahtera”** .

Pelaksanaan Penyusunan LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa merupakan pelaporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang memanfaatkan segala sumber daya dan juga dana, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja dan juga keuangan. Untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tercantum dalam perencanaan strategis (jangka menengah), yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Tahunan, kemudian ditetapkan dalam penetapan kinerja, penetapan pengukuran kinerja, pengumpulan data untuk menilai kinerja, menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja. Tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanah. Dengan demikian LKjIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa telah berupaya dalam melakukan praktik good governance dengan melakukan perbaikan secara terus menerus, dan berperan sebagai agen perubahan dalam manajemen pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sumbawa yang selalu meningkatkan sinergitas bersama masyarakat dan dunia usaha. Maka dari itu, dalam praktik good governance diperlukan penilaian indikator keberhasilan kinerja sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaannya.

1.2. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa secara struktural maupun fungsional sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tanggal tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, Serta Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Maka Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa adalah Sebagai Berikut :

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
 - a. Bidang Perikanan Tangkap, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Bidang Perikanan Budidaya, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, terdiri dari:
 - a. UPT Kelas A terdiri atas:
 - 1) Unsur pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - 2) Unsur pembantu pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha.
 - b. UPT Kelas B terdiri atas:
 - 1) Unsur pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - 2) Unsur pembantu pimpinan adalah jabatan pelaksana

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUMBAWA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

1.3. Tugas Dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan Perikanan.

Tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. Adapun tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

1. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan perikanan.
2. Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut: (a) Perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan; (b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan; (c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan; serta (d) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa dibantu oleh 5 (lima) Unit Eselon III yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sebagai berikut:

1. Sekretaris selaku unsur pembantu pimpinan;
2. Terdapat 4 (Empat) Kepala Bidang teknis selaku unsur pelaksana yaitu:
 - a. Kepala Bidang Perikanan Tangkap
 - b. Kepala Bidang Perikanan Budidaya
 - c. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan
 - d. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Uraian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1. Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Kepala Dinas	a. Menyusun perencanaan di bidang kelautan dan perikanan; b. Memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan;	a. Perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		c. Mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan; d. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan; e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan; f. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan pengawasan sumber daya perikanan serta pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas; g. Melaksanakan administrasi/ penatausahaan dinas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan; d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2	Sekretaris	a. Merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; b. Mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; c. Menganalisis bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan; d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas; e. Mengumpulkan bahan-bahan dan melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan dinas f. Mengompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja; g. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja; h. Menyusun laporan kinerja instansi pemerintah dinas, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja dinas, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dinas dan laporan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dinas;	a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan; b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		i. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; j. Melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara; k. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi; l. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan; m. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; n. Melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, laporan prognosis realisasi keuangan, laporan keuangan semesteran, dan laporan keuangan akhir tahun; o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	a. Bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan nelayan, pengelolaan tempat pelelangan ikan, dan usaha penangkapan ikan; b. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang pemberdayaan nelayan, pengelolaan tempat pelelangan ikan, dan usaha penangkapan ikan; c. Melaksanakan identifikasi, verifikasi, dan registrasi kelompok usaha bersama; d. Melaksanakan identifikasi kebutuhan kegiatan bimbingan teknis dan diklat nelayan; e. Melaksanakan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan pengembangan kapasitas nelayan kecil; f. Melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, dan kemitraan usaha; g. Melaksanakan koordinasi penyuluhan di bidang perikanan tangkap;	a. Penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan nelayan, pengelolaan tempat pelelangan ikan, dan usaha penangkapan ikan; b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan nelayan, pengelolaan tempat pelelangan ikan, dan usaha penangkapan ikan; dan c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		h. Menyiapkan bahan dan metode penyuluhan perikanan tangkap; i. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan nelayan; j. Melaksanakan identifikasi sarana dan prasarana pokok, fungsional dan penunjang tempat pelelangan ikan; k. Menyusun dan menganalisis rencana pembangunan dan pengembangan tempat pelelangan ikan; l. Menyusun petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis pengelolaan tempat pelelangan ikan; m. Melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan; n. Melaksanakan fasilitasi kerja sama pengelolaan tempat pelelangan ikan; o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan tempat pelelangan ikan; p. Melaksanakan analisis dan menyusun daftar rencana kebutuhan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan; q. Melaksanakan identifikasi dan pemanfaatan sarana perikanan tangkap di pelabuhan perikanan; r. Merancang, merumuskan dan mengkaji ulang bahan konsep norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang usaha penangkapan ikan; s. Menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyediaan/ pembangunan kapal ikan, sarana penangkapan ikan, penggunaan alat bantu dan standardisasi dan rekayasa teknologi penangkapan ikan; t. Menyusun data dan informasi sumber daya ikan dan statistik perikanan tangkap; u. Menyusun rencana kebutuhan kapal dan alat penangkapan ikan; v. Melaksanakan identifikasi dan analisa produktivitas kapal perikanan dan alat penangkapan ikan; w. Melaksanakan kegiatan penyediaan sumber daya ikan di perairan umum; x. Melaksanakan kegiatan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai 10 GT dan penerbitan ijin pengadaan kapal	atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan ukuran sampai dengan 10 GT y. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan nelayan, pengelolaan tempat pelelangan ikan, dan usaha penangkapan ikan; dan z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
4	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya; b. Memverifikasi dan mengoordinasikan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan usaha perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidaya ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan; c. Mempromosikan, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan usaha perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidaya ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan; d. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pembudidayaan ikan dan lingkungan seperti pengelolaan air dan lahan, kesehatan ikan dan lingkungan, pakan ikan dan obat-obatan, cara pembenihan ikan yang baik, cara budidaya ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan, dan pelestarian induk, calon induk dan benih ikan serta pengembangan dan fasilitasi usaha melalui bantuan kemitraan usaha, akses permodalan, pendidikan dan pelatihan kelompok perikanan budidaya; e. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pemberdayaan pembudidaya ikan, pelayanan usaha perikanan budidaya, pengelolaan pembudidayaan ikan dan lingkungan serta kegiatan pendidikan dan pelatihan, kemitraan usaha dan kelembagaan; f. Menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi pengembangan kapasitas dan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan;	a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan usaha perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidaya ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan; b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidaya ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		g. Melaksanakan pembinaan dan penertiban usaha perikanan budidaya; h. Menyiapkan data dan informasi ijin usaha perikanan dan tanda daftar pembudidayaan ikan kecil serta data dan informasi pembudidayaan ikan kecil; i. Melaksanakan fasilitasi usaha budidaya perikanan lintas daerah, penggunaan pakan dan obat-obatan dan kegiatan cara pembenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik; j. Melaksanakan fasilitasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha budidaya untuk pengembangan investasi serta fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemampuan teknis pelaku usaha kecil pembudidayaan ikan; k. Melaksanakan fasilitasi kemitraan dan akses permodalan usaha kecil pembudidayaan ikan; l. Melaksanakan fasilitasi pengendalian kualitas perairan budidaya secara berkelanjutan; m. Melaksanakan statistik perikanan budidaya; n. Melaksanakan penerbitan surat keterangan asal benih usaha budidaya; o. Menyiapkan bahan dan informasi dalam rangka investasi usaha budidaya; p. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis bagi perizinan usaha budidaya dan bagi pemanfaatan bahan bakar minyak bersubsidi; q. Melaksanakan identifikasi dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pembudidayaan ikan; r. Melaksanakan pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan dan kegiatan bimbingan teknis usaha kecil pembudidayaan ikan; s. Melaksanakan kegiatan penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang berkualitas dan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pengendalian hama dan penyakit ikan; t. Memberikan dukungan dalam perekayasaan teknologi maupun penerapan teknologi dalam usaha budidaya perikanan;	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		u. Menyiapkan dukungan sarana dan prasarana bagi pembudidaya ikan, upt, dan tambak percontohan; v. Melaksanakan koordinasi dan menjalin kerja sama kemitraan dalam usaha perikanan budidaya; w. Melaksanakan identifikasi dan pendataan kelompok pembudidaya ikan dan usaha budidaya perikanan; x. Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan dan pengembangan usaha pembudidayaan perikanan; y. Menyusun kebutuhan, distribusi dan informasi perbenihan perikanan budidaya; z. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian penggunaan pakan ikan dan obat-obatan; - aa. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan usaha perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidaya ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan - bb. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
5	Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan	a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan sumber daya perikanan; b. Memverifikasi dan mengoordinasikan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan usaha perikanan tangkap dan pengawasan usaha perikanan budidaya; c. Mempromosikan, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengawasan usaha perikanan tangkap dan pengawasan usaha perikanan budidaya; d. Melaksanakan pengawasan sumber daya perikanan tangkap, investasi perikanan tangkap dan sumber daya perikanan budidaya; e. Menyiapkan bahan, informasi, dan kajian dalam pengawasan sumber daya perikanan tangkap dan sumber daya perikanan budidaya;	a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan usaha perikanan tangkap dan pengawasan usaha perikanan budidaya; b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan usaha perikanan tangkap dan pengawasan usaha perikanan budidaya; c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		f. Melaksanakan inventarisasi sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap; g. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis pengawasan sumber daya perikanan tangkap dan perikanan budidaya; h. Menyusun dan menata regulasi tentang pengawasan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap; i. Melaksanakan pengawasan investasi perikanan budidaya; j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengawasan usaha perikanan tangkap dan pengawasan usaha perikanan budidaya; dan k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
6	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; b. Memverifikasi dan mengoordinasikan bahan kebijakan teknis di bidang bina mutu produk perikanan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan analisa pasar dan promosi produk perikanan; c. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang mutu produk perikanan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan analisa pasar dan promosi produk perikanan; d. Melaksanakan kegiatan pembinaan mutu, diversifikasi dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil; e. Melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil; f. Melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi dalam penanganan, pengolahan dan pengembangan hasil kelautan dan perikanan; g. Memfasilitasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;	a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina mutu produk perikanan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan analisa pasar dan promosi produk perikanan; b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina mutu produk perikanan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan analisa pasar dan promosi produk perikanan; c. Evaluasi dan pelaporan di bidang bina mutu produk perikanan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan analisa pasar dan promosi produk perikanan; dan ; d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		h. Memfasilitasi kelembagaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; i. Melaksanakan analisis bimbingan usaha dan permodalan bagi kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; j. Melaksanakan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan; k. Melaksanakan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan; l. Melaksanakan pemberian fasilitas sarana dan prasarana bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil; m. Melaksanakan kegiatan promosi gemar makan ikan dalam rangka mendorong peningkatan konsumsi ikan; n. Melaksanakan kegiatan pemetaan informasi, jaringan distribusi, tata kelola dan infrastruktur sistem logistik ikan; o. Melaksanakan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil; p. Melaksanakan penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan; q. Melaksanakan kegiatan promosi usaha perikanan; r. Menyusun data statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; s. Menyusun informasi harga pasar produk perikanan; t. Melaksanakan proses penerbitan surat keterangan pengiriman hasil perikanan; u. Melaksanakan kegiatan analisis akses pasar dan peningkatan kapasitas pasar usaha kelautan dan perikanan; v. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang mutu produk perikanan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan analisa pasar dan promosi produk perikanan; dan w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa mengacu pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 91 Tahun 2020, tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:

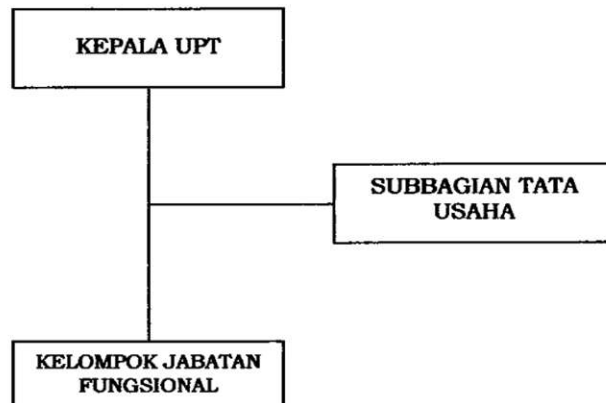
1. UPT Kelas A terdiri atas:
 - a. Unsur pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Unsur pembantu pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
2. UPT Kelas B terdiri atas:
 - a. Unsur pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Unsur pembantu pimpinan adalah jabatan pelaksana.

Tabel 1.2. Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1.	Kepala UPT Pusat Informasi Sumberdaya Kelautan	melaksanakan penyebarluasan informasi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai wilayah kerjanya	a. penyusunan rencana kerja UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyebarluasan informasi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai wilayah kerjanya; c. penyusunan perencanaan teknis operasional kegiatan penyebarluasan informasi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan; dan d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi sumber daya kelautan dan perikanan sesuai wilayah kerjanya. e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.	Kepala UPT Balai Benih Ikan Air Tawar	Melaksanakan pengembangan kegiatan perbenihan ikan air tawar	a. Penyusunan rencana kerja UPT Balai Budidaya Ikan Air Tawar; b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan perbenihan ikan air tawar; c. penyusunan perencanaan teknis operasional kegiatan pengembangan perbenihan ikan air tawar; dan d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan perbenihan ikan air tawar.; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
3.	Kepala UPT Balai Benih Ikan	melaksanakan pengembangan kegiatan perbenihan ikan pantai	a. Penyusunan rencana kerja UPT Balai Benih Ikan; b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan perbenihan ikan pantai; c. penyusunan perencanaan teknis operasional kegiatan pengembangan perbenihan ikan pantai; dan d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan perbenihan ikan pantai; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
4.	Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan	melaksanakan pengembangan tempat pelelangan ikan	a. Penyusunan program kerja UPT Tempat Pelelangan Ikan; b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan tempat pelelangan ikan; c. Penyusunan perencanaan teknis operasional kegiatan pengembangan tempat pelelangan ikan; d. Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan tempat pelelangan ikan; e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan tempat pelelangan ikan; f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5.	Sub Bagian Tata Usaha UPT	menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan	a. penyusunan rencana kerja UPT; b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT.

I. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELAS A



Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tipe A

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1.4. Sumber Daya Manusia Aparatur dan Sarana Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa

A. Sumber Daya Manusia

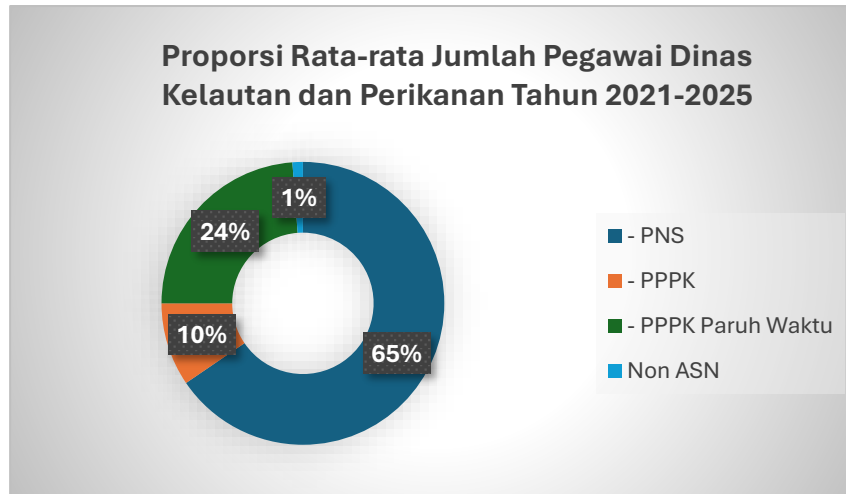
Dalam mengemban tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa ditunjang oleh sumber daya manusia yang tersebar di unit kerja yang ada. Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Kelautan dan perikanan terdiri dari pegawai ASN dan pegawai Non-ASN. Karakteristik pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3. Karakteristik Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pegawai	84	84	86	86	84
	ASN	56	55	58	58	83
	- PNS	56	55	58	55	55
	- PPPK	-	-	-	3	8
	- PPPK Paruh Waktu	-	-	-	-	20
	Non ASN (Jasa Keamanan)	28	29	28	28	1
2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin:					
	Laki-Laki	38	38	40	38	52
	Perempuan	18	17	18	20	32
3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia:					
	< 25 tahun	1	1	-	-	-
	25 - 35 Tahun	2	2	4	4	13
	36 - 45 Tahun	28	28	17	17	30
	46 - 55 Tahun	23	23	33	33	36
	> 55 Tahun	2	1	4	4	5
4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan:					
	SD	2	1	1	1	1
	SMP Sederajat	5	4	4	4	4
	SMA Sederajat	22	21	16	18	20
	Diploma (D1-D3)	3	4	4	4	3
	S1 / D IV	48	50	55	54	52
	S2	4	4	6	5	4

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2025

Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) tidak mengalami perubahan yang signifikan, yaitu berkisar 84 – 86 orang pegawai baik ASN maupun non ASN setiap tahunnya. Rata-rata komposisi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa tahun 2021 – 2025 terdiri atas pegawai PNS sebanyak 65%, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 10 %, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) Sebanyak 24 dan pegawai Non ASN sebanyak 1%. Proporsi Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dalam Gambar 1.3 berikut ini:



Gambar 1.3 Rata-rata Proporsi Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa Tahun 2020-2024

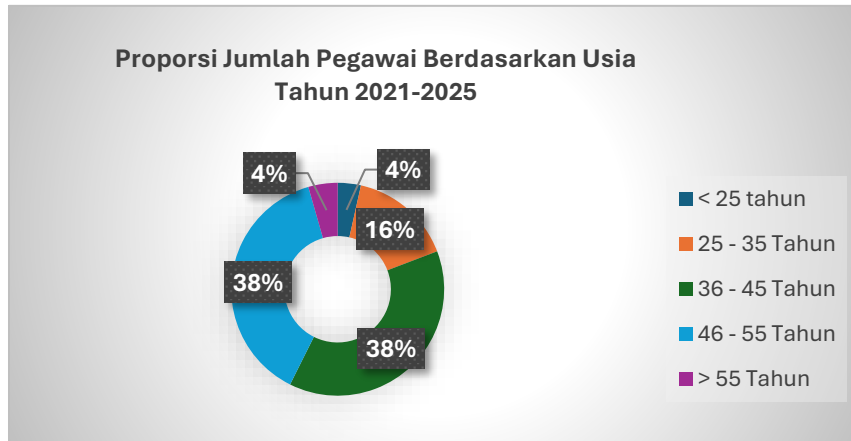
Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024 proporsi pegawai laki-laki lebih besar dari pegawai perempuan. Rata-rata disajikan pada gambar 1.4 berikut.



Gambar 1.4. Komposisi Pegawai ASN dan Non-ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbawa Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

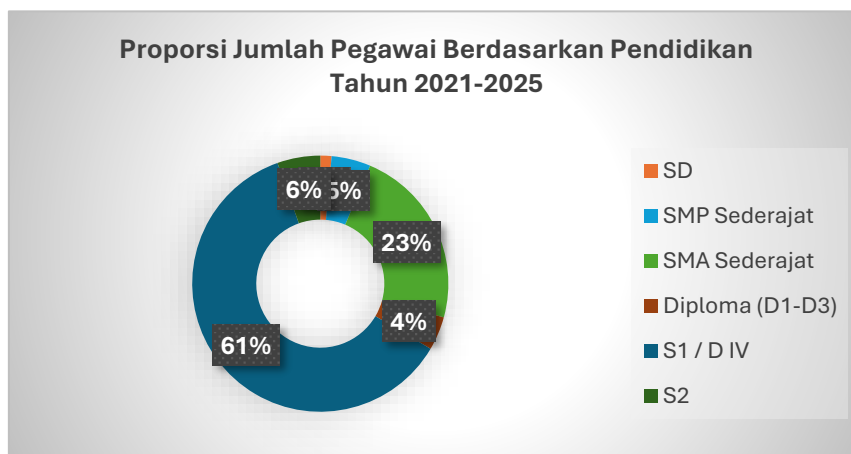
Berdasarkan kelompok Usia sumber daya manusia (SDM) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa tahun didominasi kelompok usia 36 – 45 Tahun (38%) dan 46 – 55 tahun (38%). Dari data ini SDM Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa kelompok usia 46 – 55 tahun (38%) dapat dikategorikan sebagai pegawai pengalaman tinggi sampai dengan menjelang masa pensiun, menduduki jabatan pengambil kebijakan atau pengawas. Sedangkan kelompok usia 36 – 45 tahun (38%) di kategorikan sebagai pegawai dengan puncak masa produktif. Komposisi usia tenaga kerja yang didominasi oleh kelompok usia 46–55 tahun mengindikasikan perlunya strategi regenerasi yang cepat dan terstruktur. Kelompok usia 36–45 tahun harus diposisikan sebagai generasi pelanjut, sementara langkah rekrutmen dan penguatan

tenaga kerja usia muda perlu segera dirancang. Hal ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik dan efektivitas organisasi dalam jangka panjang. Rata-rata komposisi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa berdasarkan usia disajikan pada gambar 1.5 dibawah ini:



Gambar 1.5 Rata-rata Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Kelompok Usia

Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa tahun 2020-2024 didominasi pegawai berpendidikan Sarjana baik itu ASN maupun non ASN dengan persentase sebesar 61% . Hal ini menunjukkan kesiapan organisasi dalam menghadapi tugas-tugas fungsional dan struktural. Namun, upaya peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan lanjut dan pelatihan teknis tetap diperlukan, terutama bagi ASN dengan tingkat pendidikan menengah dan vokasi. Dengan demikian, kualitas birokrasi dapat terus ditingkatkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Rata - rata Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 1.6 dibawah ini:



Gambar 1.6. Rata - rata komposisi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024

Untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme sumberdaya manusia aparatur yang memadai, penentuan kebutuhan pegawai harus berdasarkan beban kerja beban kerja. Analisis beban kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel 1.4 dibawah ini.

Tabel 1.4 Analisis beban kerja Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Jabatan	Jumlah	ABK	Kelebihan /Kekurangan
I	STRUKTURAL	23	31	-8
1	Kepala dinas	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
3	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	1	1	0
4	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	1	1	0
5	Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan	1	1	0
6	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	1	0
7	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	1	1	0
8	Kepala UPTD	11	12	-1
9	Kepala Tata Usaha (UPT)	5	12	-7
II	JABATAN FUNGSIONAL	17	63	-46
1	JF Perencana	0	3	-3
2	JF Analis Kebijaka	0	3	-3
3	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah	1	3	-2
4	JF Arsiparis	0	3	-3
5	JF Pranata Komputer	0	3	-3
6	JF Pranata SDM Aparatur	0	3	-3
7	JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	3	9	-6
8	JF Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	1	1	0
9	JF Analis Akuakultur	4	9	-5
10	JF Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	1	1	0
11	JF Pengawas Perikanan	2	13	-11
12	JF Analis Pasar Hasil Perikanan	2	5	-3
13	JF Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3	7	-4
III	PELAKSANA	44	133	-89
1	Operator Layanan Operasional	12	27	-15
2	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	2	21	-19
3	Penata Layanan Operasional	15	17	-2
4	Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	0	2	-2
5	Penelaah Teknis Kebijakan	3	5	-2
6	Pengadministrasi Perkantoran	5	28	-23
7	Pengelola Layanan Operasional	1	1	0
8	Pengelola Umum Operasional	3	3	0

No.	Jabatan	Jumlah	ABK	Kelebihan /Kekurangan
9	Pengolah Data dan Informasi	3	29	-26
	TOTAL	84	227	-143

Sumber: Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan data Analisis Beban kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, terdapat kekurangan pegawai sebesar 62,99% yang terdiri dari pada Jabatan Struktural sebesar 3,52%, Jabatan Fungsional sebesar 20,26% dan Jabatan Pelaksana sebesar 39,20%. Dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai yang tersedia saat ini belum mencukupi untuk menjalankan seluruh tugas dan fungsi organisasi secara optimal. sehingga diperlukan upaya penambahan pegawai atau penguatan kapasitas yang ada untuk memastikan pelayanan publik dapat tetap berjalan secara optimal.

B. Sumber Daya Sarana Prasarana Perangkat Daerah

Sarana dan prasarana dinas mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting untuk mendukung aktivitas pelayanan umum kepada masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa telah memiliki sarana yang cukup memadai untuk mendukung aktivitas tersebut. Sarana tersebut meliputi sarana komunikasi, transportasi, sarana kerja aparatur.

1) Inventaris Tanah

Berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, daftar inventaris tanah dari tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 1.5 berikut.

Tabel 1.5 Daftar Inventaris Tanah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

No	Jenis>Nama Barang	Satuan	Jumlah BMD Pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Bidang Tanah	Bidang	28	28	28	28	28
2	Luas Bidang Tanah	M2	147.004	147.004	147.004	147.004	147.004

Secara rinci inventaris tanah yang berada di bawah penguasaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) disajikan pada Tabel 1.6 berikut.

Tabel 1.6 Daftar Inventaris Tanah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

No	Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun	Lokasi/Letak	Status	Penggunaan	Asal Usul
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	691,00	2012	Desa Empang	Hak Pakai		Pembelian

No	Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun	Lokasi/Letak	Status	Penggunaan	Asal Usul
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2.350,00	2012	Tlk. Santong Kec. Plampang	Hak Pakai		Pembelian
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	320,00	2012	Lab. Ijuk	Hak Pakai		Pembelian
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.200,00	2012	Kel. Pekat Sumbawa Besar	Hak Pakai	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa	Pembelian
5	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	480,00	2012	Lab. Terata Kec. Lape			Pembelian
6	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	480,00	2012	Lab. Jontal Tlk Santong	Hak Pakai		Pembelian
7	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	473,00	2012	Aipaya Lab. Aji Tarano	Hak Pakai		Pembelian
8	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	48,00	2012	Lab. Jambu Kec Tarano	Hak Pakai		Pembelian
9	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	1.294,00	2012	Lab. Mapin Alas Barat	Hak Pakai		Pembelian
10	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	144,00	2012	Lab. Jambu Tarano	Hak Pakai		Pembelian
11	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	660,00	2012	Teluk Santong Plampang	Hak Pakai		Pembelian
12	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	400,00	2012	Lunyuk Rea	Hak Pakai		Pembelian
13	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	8.470,00	2012	Lab. Mapin Alas Barat	Hak Pakai		Pembelian
14	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	159,00	2012	Lab. Sumbawa	Hak Pakai		Pembelian
15	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	300,00	2012	aipaya, Lab. Aji Kec. Tarano	Hak Pakai		Pembelian
16	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	5.000,00	2012	Lekong, Alas Barat		Dialihkan ke BP4K	Pembelian
17	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	400,00	2012	Empang Atas	Hak Pakai		Pembelian
18	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	105,00	2012	Ai Paya			Pembelian
19	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	130,00	2012	Labuhan Alas	Hak Pakai	UPT PISDKP Alas	Pembelian
20	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1.300,00	2012	Lab. Alas	Hak Pakai	Kantor Portal/Resort Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembelian
21	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	400,00	2012	Lab. Sumbawa	Hak Pakai		Pembelian
22	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	300,00	2012	Kec. Lunyuk	Hak Pakai		Hibah
23	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	50.000,00	2012	Lab. Jontal Plampang	Hak Pakai		Pembelian

No	Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun	Lokasi/Letak	Status	Penggunaan	Asal Usul
24	Tanah Tambak/Empang/Kolam	20.000,00	2012	Desa Penyaring Moyo Utara	Hak Pakai	Tambak	Pembelian
25	Tanah Tambak/Empang /Kolam	50.000,00	2012	Lab Terata Lopok	Hak Pakai		Pembelian
26	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	100,00	2012	Lab Sumbawa Lab Sumbawa	Hak Pakai		Pembelian
27	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	400,00	2012	Empang Atas	Hak Pakai		Pembelian
28	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	400,00	2012	Lab. Terata Kec. Lopok	Hak Pakai		Pembelian

Sumber: Kartu Inventaris Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Tahun 2025.

2) Inventaris Peralatan dan Mesin

Daftar inventaris peralatan dan mesin pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang diadakan pada tahun 2020-2024 dirincikan pada Tabel 1.7 dibawah ini.

Tabel 1.7 Daftar inventaris peralatan dan mesin pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang diadakan pada tahun 2020-2024

No.	Kendaraan Khusus	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kapal patroli pengawasan	2	2	2	2	2
2.	Kapal kawasan konservasi	1	1	1	1	1
3.	Mobil Alih Teknologi dan Informasi	1	1	1	1	1
4.	Mobil Angkutan Berpendingin	1	1	1	1	1
5.	Mobil Industrialisasi Perikanan (bus penyuluhan)	1	1	1	1	1
6.	Mobil	3	3	3	3	3
7.	Mobil pick up	3	3	3	3	3
8.	Sepeda Motor roda 2	65	63	63	63	63
9.	Sepeda Motor roda 3	7	3	3	3	3
10.	Komputer PC	12	11	11	11	11
11.	Laptop	26	33	33	33	33
12.	Printer	24	43	43	43	43
13.	Air Conditioner	20	10	10	16	16
14.	Meja Kerja	52	52	52	52	52
15.	Kursi	147	137	137	137	137
16.	Lemari	44	44	44	44	44
17.	Filling Kabinet	2	2	2	2	2

Sumber: Kartu Inventaris Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Tahun 2025.

Sarana penunjang lain yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa berupa sarana informasi portal berupa website dengan kode akses: www.dkp.sumbawakab.go.id Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumbawa.

C. Sumber Daya Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa no. 91 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, maka Unit usaha yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa terdiri 12 unit, yaitu:

1. UPT Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBIAT) yang berlokasi di Desa Rhee Kecamatan Rhee;
2. UPT Balai Benih Ikan (BBI) yang berlokasi di Dusun Meno Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee;
3. UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Pengamas yang berlokasi Kec. Labuhan Badas
4. UPT TPI Teluk Santong yang berlokasi di Kecamatan Plampang.
5. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PISDKP) Alas (wilayah kerja Kecamatan Alas Barat, Alas, dan Buer);
6. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Utan (wilayah kerja Kecamatan Utan dan Rhee);
7. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Labuan Badas (wilayah kerja Kecamatan Labuan Badas, Sumbawa, Unter Iwes, dan Batulante);
8. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Moyo (wilayah kerja Kecamatan Moyo Utara, Moyo Hulu dan Moyo Hilir);
9. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lape (wilayah kerja Kecamatan Lopok, Lape, Lantung, dan Ropang);
10. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lunyuk (wilayah kerja Kecamatan Lenangguar, Orong Telu, dan Lunyuk);
11. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Plampang (wilayah kerja Kecamatan Plampang, Labangka, dan Maronge);
12. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Empang (wilayah kerja Kecamatan Empang dan Tarano).

1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

Maksud penyusunan LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa kepada Bupati dan juga kepada masyarakat atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan Kualitas capaian kinerja yang diharapkan,
2. Memberikan gambaran penetapan Prinsip-prinsip good government, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan
3. Memberikan informasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasar pada Peraturan perundang-undangan, kebijakan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

1.6. Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan pembangunan bidang kelautan dan perikanan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1	2	3		4	
1	Pengelolaan Kelautan dan Perikanan belum optimal	1	Produksi dan produktivitas perikanan budidaya yang belum optimal	1	- Kualitas SDM pembudidaya yang belum optimal - Teknologi pembudidayaan ikan yang belum optimal - Kualitas benih dan induk unggul yang belum optimal - Mahalnya harga pakan
		2	Produksi dan produktivitas perikanan Tangkap yang belum optimal	2	- Kualitas SDM nelayan yang belum optimal - Menurunnya stok sumber daya ikan - Teknologi penangkapan ikan yang belum optimal - Akses nelayan terhadap fasilitas penangkapan ikan yang belum optimal
		3	Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Bidang Perikanan yang belum optimal	3	Belum optimalnya kesadaran nelayan, Pembudidaya Ikan serta Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan untuk mengurus dokumen administrasi Sesuai ketentuan yang berlaku
		4	Nilai tambah industri produk olahan dan pemasaran hasil perikanan yang berdaya saing yang belum optimal	4	- Kualitas Pengolahan yang belum optimal - Akses pasar Produk Kelautan dan Perikanan yang belum optimal - Kapasitas usaha pengolahan dan pemasaran yang belum optimal - Masih terbatasnya investasi yang bergerak dalam pemanfaatan dan Pengolahan hasil sumberdaya kelautan dan perikanan
2	Belum optimalnya Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik belum berkualitas dan efektif.	1	- Belum optimalnya pengelolaan pemerintahan berbasis IT (information technology) - Rendahnya efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan - Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan

Dari permasalahan yang telah di petakan pada tabel diatas dapat di tarik beberapa isu strategis pembangunan kelautan dan perikanan kabupaten sumbawa. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu-isu strategis diidentifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu yang mempengaruhi visi, misi, output, biaya dan atau manajemen. Cara mengidentifikasi dan memilih selanjutnya mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa melakukan perencanaan, realisasi dan pengawasan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Tabel 1.9 Isu Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan Perangkat Daerah	Pelayanan Publik belum sepenuhnya efektif dan efisien, ditandai dengan pemanfaatan IT (teknologi informasi) belum optimal. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik belum berkualitas dan efektif.	Lemahnya Penegakan Hukum, Birokrasi, dan Pelayanan Publik Sistem birokrasi yang kurang efektif, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kualitas pelayanan publik menghambat tata kelola pemerintahan yang baik.	Tantangan pelayanan pemerintahan yang membutuhkan adaptasi dan inovasi., Peningkatan kualitas pelayanan publik pengembangan SDM, penerapan teknologi, dan penguatan <i>goodgovernance</i> Adanya berbagai standar global untuk menilai birokrasi dari suatu instansi, Misalnya <i>Global Competitiveness Index, Open Government Index, Ease of Doing Business, Worldwide Government Indicators (WGI), Bureaucracy Index, dan Government effectiveness Index</i>).	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan: Transformasi digital layanan publik, peningkatan indeks reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, karena belum sepenuhnya terbangun integrasi sistem layanan pubik. Desain organisasi perangkat daerah masih asimetris/belum bersifat afirmatif terhadap permasalahan dan prioritas Pembangunan daerah.	Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi: Peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan publik, optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Akselerasi transformasi digital: Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, ekonomi, pendidikan, serta integrasi sistem digital dalam pemerintahan daerah.	Efektivitas dan efisiensi pelayanan publik berbasis teknologi informasi belum optimal Implementasi manajemen kinerja dan akuntabilitas publik belum berjalan optimal

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Perekonomian (Productivity, P4)	Pengelolaan Kelautan dan Perikanan belum optimal	Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi → Ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, lapangan pekerjaan	Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan: Overfishing masih menjadi ancaman besar; 1 dari 3 stok ikan laut dunia telah dieksploitasi berlebihan. Meningkatnya kebutuhan akan pendekatan Ecosystem-Based Fisheries Management (EBFM) dan penetapan Total Allowable Catch (TAC) berdasarkan data ilmiah. Pemberantasan IUU Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing) Praktik IUU menyebabkan kerugian lebih dari US\$20 miliar/tahun dan mengancam ketahanan pangan, ekonomi, dan kedaulatan laut negara berkembang. Inovasi Pendanaan dan Teknologi Biru (Blue Finance & Blue Tech):	Hilirisasi industri dan peningkatan daya saing ekonomi : Pengembangan industri berbasis sumber daya alam, peningkatan nilai tambah sektor Perikanan Implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT): Salah satu program prioritas KKP (2023–2025) yang bertujuan menjaga stok ikan tetap lestari sekaligus meningkatkan nilai tambah nasional.. Peningkatan produktivitas sektor perikanan: Optimalisasi perikanan tangkap berkelanjutan. Kesejahteraan Nelayan & Pelaku Usaha Perikanan Kecil: Masih banyak nelayan dan pembudidaya hidup di bawah garis kemiskinan, dengan akses terbatas ke	Pembangunan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas sektor ekonomi non tambang: Diversifikasi ekonomi dengan mendorong sektor pertanian, perikanan, manufaktur, serta ekonomi kreatif.	Produksi/ Produktivitas Kelautan dan Perikanan produk unggulan belum optimal. Belum optimalnya infrastruktur bidang perikanan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
			Munculnya blue bond, blue carbon, dan ESG investment untuk proyek konservasi laut dan perikanan berkelanjutan.	pembiayaan, teknologi, dan pasar. Penguatan Budidaya Ikan & Udang Berkelanjutan: Produksi perikanan budidaya (khususnya udang, nila, lele, bandeng) menjadi andalan peningkatan ekspor dan ketahanan pangan.		

BAB II PERENCANAAN KINERJA

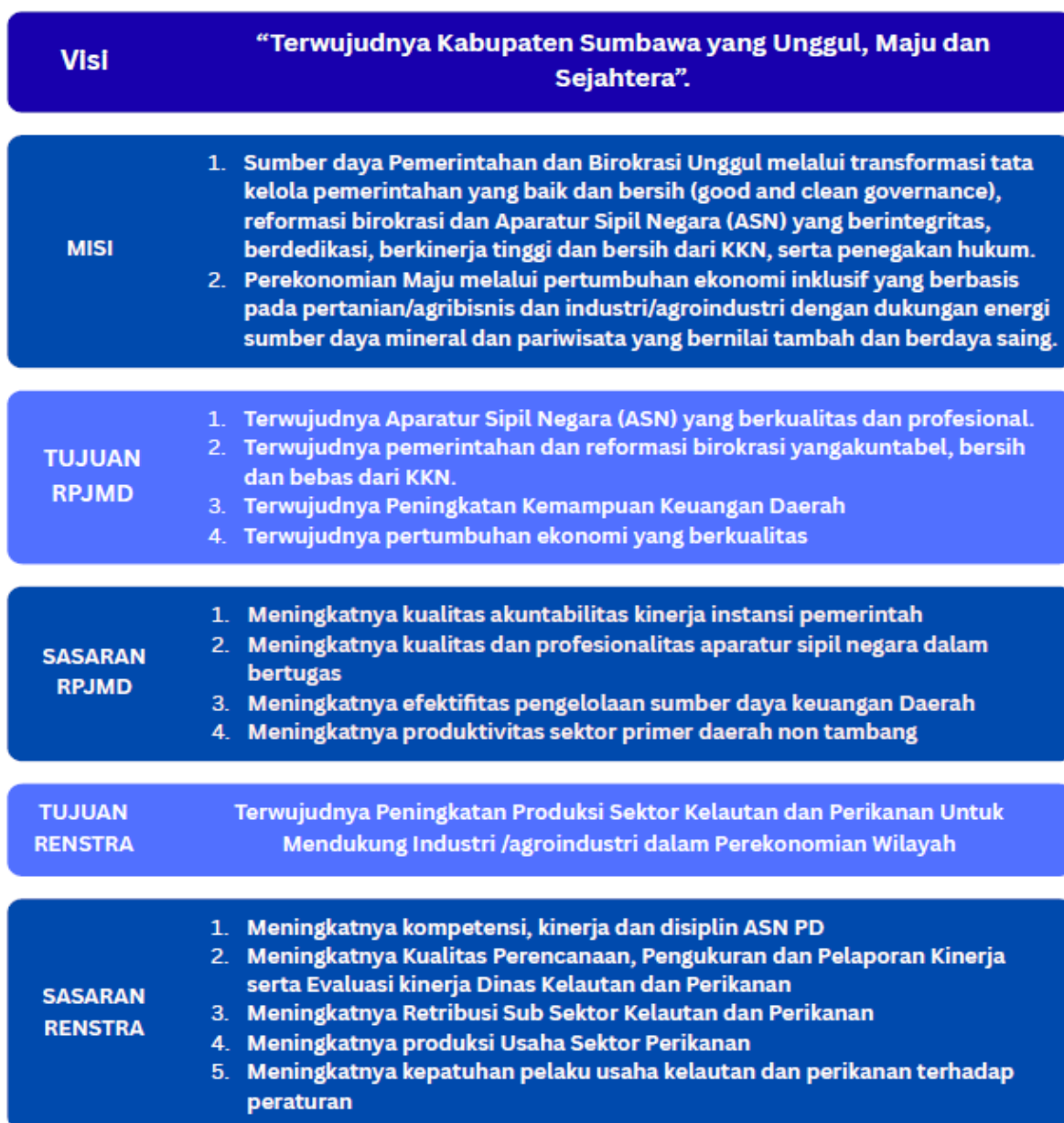
Pembangunan kelautan dan perikanan merupakan bagian dari pembangunan Kabupaten Sumbawa. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis, menuntut percepatan

pembangunan kelautan dan perikanan agar mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak secara cepat. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, maka perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perencanaan Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa agar mampu menjawab tuntutan Perkembangan dan percepatan Pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumbawa. Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa didasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 - 2029 dimana RPJMD berfungsi sebagai pedoman manajerial taktis strategis beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolak ukur dan target kinerja apa saja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran yang bersangkutan.

2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa menentukan tujuan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Penentuan tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa berfokus terhadap indikator sasaran pemerintah daerah dalam RPJMD yang berkesesuaian dengan jenis kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. Keselarasan antara tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2025-2029 dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025-2029 tersaji pada Gambar di bawah ini:



Gambar 2.1. Keselarasan antara tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2025-2029 dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025-2029

Secara rinci target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)		(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Meningkatnya kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara dalam bertugas	Terwujudnya Peningkatan Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Mendukung Industri /agroindustri dalam Perekonomian Wilayah	Indeks Implementasi NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara (Indeks)			76,54	79,61	82,81	86,13	89,58	93,18	96,92
			Meningkatnya kompetensi, kinerja dan disiplin ASN PD	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Angka)			3,417	3,427	3,437	3,447	3,457	3,467	3,477
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja serta Evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori AKIP PD (Kategori)	A	A	A	A	A	A	A
Meningkatnya efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan Daerah		Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (%)			13,06	10,07	10,48	10,59	10,62	10,55	10,47
			Meningkatnya Retribusi Sub Sektor Kelautan dan Perikanan	Proporsi retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah (%)	3,13	0,32	0,31	0,28	0,25	0,23	0,2
Meningkatnya produktivitas		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK) (%)			1,30	1,29	1,28	1,27	1,26	1,22	1,20

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)		(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
sektor primer daerah non tambang			Meningkatnya produksi Usaha Sektor Perikanan	Laju Peningkatan produksi Perikanan (%)	-	2,00	2,06	2,11	2,15	2,2	2,24
			Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan	Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring) (%)	-	75	75	75	75	75	75

2.2. Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan sasaran strategis dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sumbawa tahun 2025 melaksanakan beberapa Program dan Kegiatan Sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota
 2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab/Kota
 3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 4. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota
- c) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota
 2. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 3. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota
 4. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- d) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kab/Kota
- e) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota

2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya yang didukung dengan program/kegiatan yang didanai oleh APBD dan APBN Tahun Anggaran 2025. Sesuai dengan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan 2025-2029, maka Penetapan Kinerja pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kompetensi, kinerja dan disiplin ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori	Sedang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.984.053.518,00
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja serta Evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori	A		
3	Meningkatnya Retribusi Sub Sektor Kelautan dan Perikanan	Proporsi retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah	%	0,32		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Meningkatnya Produksi Usaha Sektor Perikanan	Laju Peningkatan Produksi Perikanan	%	2,06	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 2.566.780.000,00
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 2.539.962.500,00
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 41.565.000,00
5	Tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan	Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring)	%	75	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 243.630.189,00

2.4. Instrumen Pendukung Pengukuran Capaian Kinerja

Dalam rangka pengukuran kinerja Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Sumbawa didukung dengan beberapa Instrumen/Aplikasi Pendukung yaitu :

1. E-SAKIP SUMBAWA

E-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Melalui sistem ini, seluruh tahapan manajemen kinerja pemerintah dapat dilakukan secara terintegrasi dan berbasis digital, mulai dari:

➤ Perencanaan

Menyusun dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD, Renstra, RKT, dan Perjanjian Kinerja yang menjadi arah dan pedoman pencapaian tujuan daerah.

➤ Pengukuran

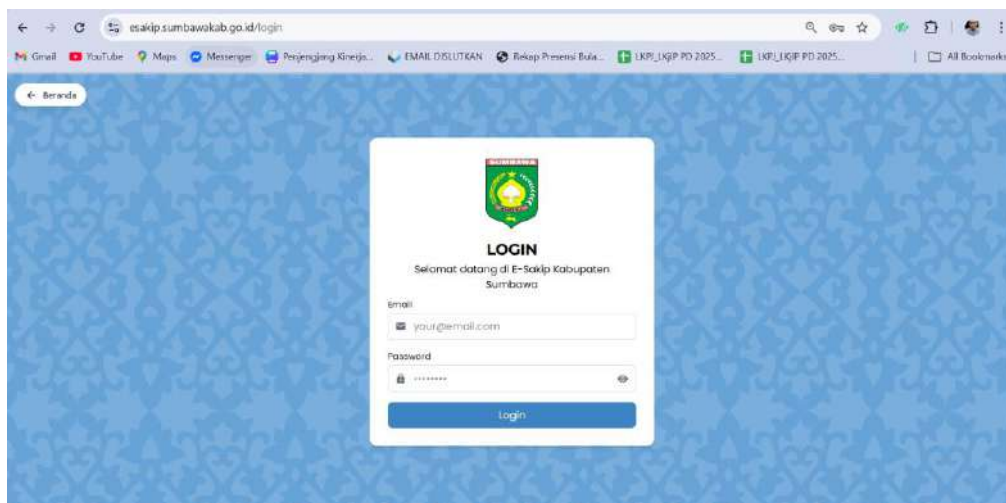
Memastikan pencapaian target kinerja melalui indikator yang jelas, terukur, serta dilengkapi dengan analisis yang objektif.

➤ **Pelaporan**

Menyajikan capaian kinerja perangkat daerah dalam bentuk laporan yang transparan, mudah diakses, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

➤ **Evaluasi**

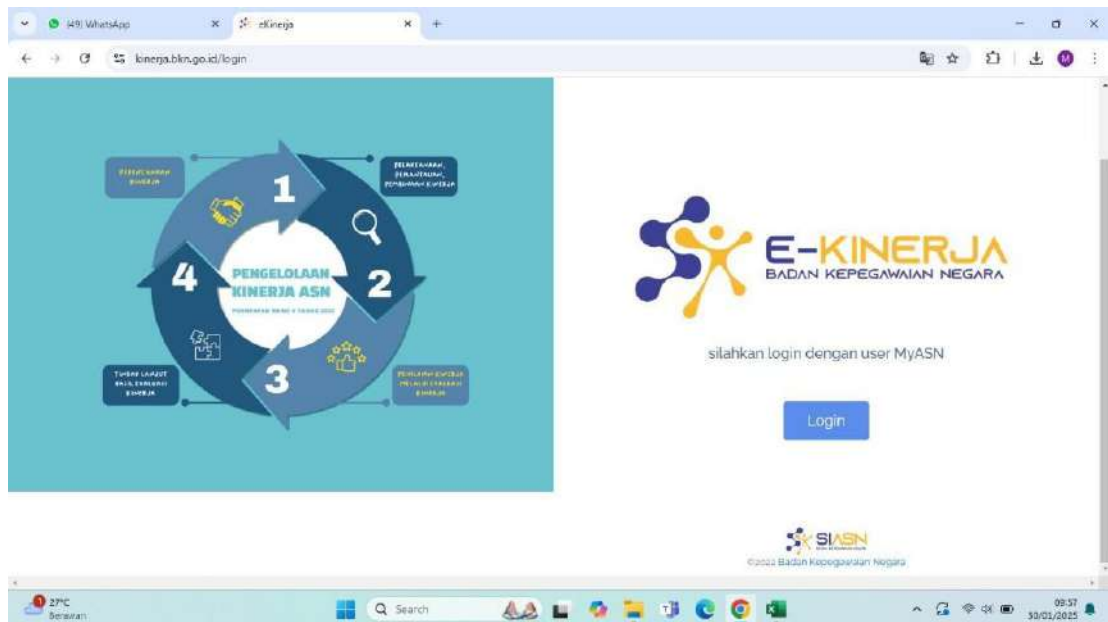
Menilai hasil pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan kinerja pemerintah berjalan sesuai rencana serta memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan. Dengan adanya E-SAKIP, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.



Gambar 2.2. Aplikasi E-SAKIP Sumbawa

2. E-Kinerja BKN

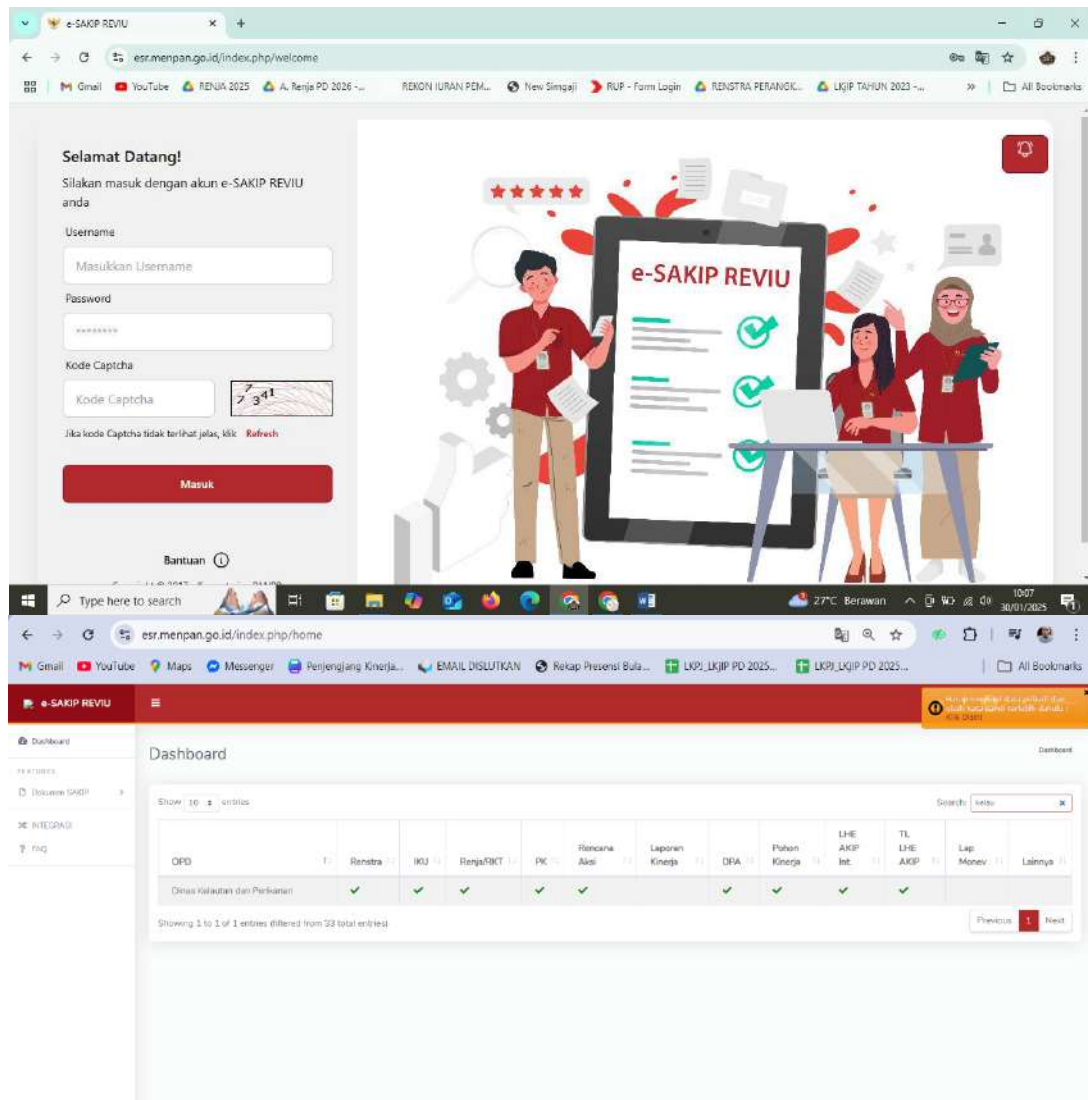
E-Kinerja adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membantu mengelola, memantau, dan menilai kinerja aparatur sipil negara (ASN) secara elektronik. Aplikasi ini mendukung implementasi manajemen kinerja ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Aplikasi ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan upaya reformasi birokrasi di Indonesia. Dengan penerapan yang baik, diharapkan aplikasi ini dapat meningkatkan akuntabilitas pegawai, efisiensi birokrasi, dan sinergi antara kinerja individu dengan pencapaian organisasi. Namun, keberhasilannya memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak didukung oleh infrastruktur teknologi dan pelatihan yang memadai.



Gambar 2.3. Aplikasi E-KINERJA BKN

3. E-SAKIP REVIU MENPAN (ESR MENPAN)

Aplikasi ESR (*Evaluation System Reform*) Menpan adalah *platform* digital yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memantau, mengevaluasi, dan mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Aplikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap instansi menjalankan agenda reformasi birokrasi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Dengan memanfaatkan aplikasi ini, Kemenpan RB dapat memastikan bahwa instansi pemerintah di seluruh Indonesia menjalankan program reformasi birokrasi dengan baik, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Keberhasilan ESR Menpan sangat bergantung pada komitmen, kualitas data, dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tugas Perangkat Daerah dengan aplikasi ini mencakup pengisian penilaian mandiri, pengelolaan data kinerja, evaluasi dan perbaikan, hingga pengembangan inovasi pelayanan publik. Perangkat daerah juga bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang akuntabel, transparan, dan konsisten dengan visi pemerintah pusat. Keberhasilan menggunakan aplikasi ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan, keterlibatan seluruh pegawai, dan sinergi yang baik dengan Kemenpan RB. Saat ini belum seluruh menu dilaksanakan namun demikian akan terus ditingkatkan setiap tahunnya.



Gambar 2.4. Aplikasi ESR MENPAN

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodisasi. Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tercapai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan berkelanjutan dapat membantu instansi pemerintah untuk tetap fokus pada tujuan, mengidentifikasi potensi masalah, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mendukung pencapaian hasil yang optimal. Hasil pengukuran kinerja ini menjadi dasar dalam pembangunan berbasis kinerja. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa dalam membangun akuntabilitas kinerja, pengembangan *e-monev* adalah bagian dari kunci dalam mendorong pelembagaan pengendalian dan evaluasi yang transparan serta berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Penyusunan LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 053 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga dipakai dalam penyusunan LKjIP ini.

Tabel 3.1 Kriteria Realisasi/Tingkat Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja		Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan
1	91 - ≤100	Sangat Tinggi	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
2	76 - ≤90	Tinggi	
3	66 - ≤75	Sedang	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 - ≤65	Rendah	Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤50	Sangat Rendah	

Setiap indikator kinerja yang telah dilakukan pengukuran, selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diantaranya membandingkan antara realisasi kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya.

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025 diukur berdasarkan tingkat capaian pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 serta Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa terdapat 2 sasaran strategis yang hendak dicapai, yaitu: 1). Meningkatnya produksi perikanan dengan indikator kinerja utama yaitu jumlah produksi perikanan dan 2). Tercapainya Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja utama yaitu Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sedangkan berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 Serta Tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa terdapat 3 Sasaran Yaitu: 1). Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pelayanan PD , 2). Meningkatnya Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan dan 3). Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perikanan dan kelautan.

Setiap indikator sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan, akan disajikan secara

lengkap berdasarkan:

- a) Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja;
- b) Target, Realisasi dan Capaian Kinerja;
- c) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun n dengan tahun n-1;
- d) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan target RPJMD tahun n;
- e) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan kinerja provinsi dan target nasional tahun n;
- f) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- g) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- h) Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Secara lengkap tabel Indikator Utama (IKU) dan Indikator Utama Perubahan Dinas kelautan dan perikanan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan	Ton	Produksi Perikanan ikan adalah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun N dijumlahkan dengan Produksi Perikanan Budidaya Tahun N	1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap 2. Kepala Bidang Perikanan Budidaya 3. Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan 4. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran
2	Tercapainya target akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai (Huruf)	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai AKIP PD tahun n-1 publikasi APIP tahun n	1. Sekretaris Dinas

Tabel 3.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pelayanan PD	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat pemenuhan aspek profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam suatu Perangkat Daerah, yang mencakup kompetensi, kualifikasi, kinerja, disiplin, dan etika profesi, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh instansi pembina kepegawaian.	Tingkat IPASN: merupakan kategori IPASN yang menjadi ukuran kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN untuk penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN, dengan kriteria yaitu: 91-100 : Sangat Tinggi 81-90 : Tinggi 71-80 : Sedang 61-70 : Rendah < 60 : Sangat Rendah.	Sekretaris Dinas
		Kategori AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Ka	AKIP merupakan mekanisme untuk menilai seberapa baik instansi pemerintah dalam pengelolaan kinerja: mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan hingga evaluasi dan pertanggungjawaban.	Kategori AKIP: Merupakan kategori kualitas AKIP yang menjadi gambaran implementasi akuntabilitas kinerja, dengan kategori yaitu: AA (> 90 – 100) : Sangat Memuaskan A (> 80 – 90) : Memuaskan BB (> 70 – 80) : Sangat Baik B (> 60 - 70) : Baik CC (> 50 – 60) : Cukup (Memadai) C (> 30 – 50) : Kurang D (> 0 – 30) : Sangat Kurang Catatan: Kategori AKIP secara reguler diukur dan dirilis oleh Inspektorat Daerah.	Sekretaris Dinas

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
		Proporsi retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah	%	Proporsi retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah adalah perbandingan antara total retribusi yang diperoleh dari kegiatan sektor kelautan dan perikanan dengan total retribusi daerah secara keseluruhan.	Rumus Perhitungan: $\text{Proporsi Retribusi Sektor Perikanan} = \frac{\text{Retribusi Sektor Perikanan}}{\text{Total Retribusi Daerah}} \times 100\%$	Sekretaris Dinas
2	Meningkatnya Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	Laju Peningkatan Produksi Perikanan	%	Laju produksi perikanan adalah tingkat pertumbuhan atau penurunan jumlah hasil produksi perikanan dari satu periode ke periode berikutnya (biasanya dari tahun ke tahun).	Laju Peningkatan Produksi Perikanan: secara umum mengukur seberapa cepat produksi sektor perikanan meningkat dalam kurun waktu tertentu. Rumus Perhitungan : $\text{Laju Pertumbuhan Produksi} = \left(\frac{\text{Produksi Tahun ke-}n - \text{Produksi Tahun ke-}(n-1)}{\text{Produksi Tahun ke-}(n-1)} \right) \times 100\%$	1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap 2. Kepala Bidang Perikanan Budidaya 3. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran
3	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perikanan dan kelautan	Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring)	%	Persentase pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan hasil audit, pengawasan, atau monitoring resmi oleh	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh berdasarkan Hasil Monitoring dan pengawasan dibagi dengan Jumlah total pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diawasi/monitoring $\times 100\%$ $\text{Persentase Kepatuhan} = \left(\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang patuh}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang diaudit/di-monitoring}} \right) \times 100\%$	1. Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
				instansi berwenang dalam periode waktu tertentu.		

A. TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 di hitung dengan membandingkan antara Capaian Kinerja dengan Target Kinerja pada masing-masing indikator sasaran Strategis Tahun 2025.

Tabel 3.4. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tercapainya Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori	A	A	100,00
2	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	328.500,00	335.113,40	102,01
		Capaian Rata-Rata	%			101,01
		Capaian Tertinggi	%			102,01
		Capaian Terendah	%			100,00

Tabel 3.5. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pelayanan PD	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori	Sedang	Sedang	100,00
		Kategori AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori	A	A	100,00
		Proporsi retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah	%	0,32	0,23	71,88
2	Meningkatnya Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	Laju Peningkatan Produksi Perikanan	%	2	-53,57	-2678,50
3	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perikanan dan kelautan	Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring)	%	75	100	133,33
		Capaian Rata-Rata	%			(454,66)
		Capaian Tertinggi	%			133,33
		Capaian Terendah	%			(2.678,50)

Berdasarkan tabel 3.4 target, realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2025, Rata – rata capaian indikator kinerja utama dinas sebesar 101,01 % dengan nilai capaian terendah pada indikator kinerja Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan 100% dan capaian tertinggi pada indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan mencapai 102,01%. Pencapaian Indikator jumlah produksi perikanan ini disebabkan oleh penyesuaian target produksi pada Triwulan IV sebagai respons terhadap berbagai kondisi yang mempengaruhi kinerja sektor perikanan. Penyesuaian target tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja yang ditetapkan tetap realistis, terukur, dan dapat dicapai sesuai dengan kondisi lapangan.

1. INDIKATOR KINERJA KATEGORI NILAI AKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (RENSTRA 2021-2025)

Indikator Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan pencapaian kinerja mencapai 100%, Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 yang dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa pada tahun 2025 maka capaian yang diperoleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa dalam nilai kisaran 0 – 100 adalah sebesar 83,67 dan masuk dalam kategori nilai A dengan interpretasi **memuaskan**. Jika dibandingkan dengan target Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar 84,6 capaian kinerja mencapai 98,90. Hal ini dapat dikatakan kriteria capaian kinerja terhadap sasaran Strategis tercapainya target tercapainya target akuntabilitas kinerja dinas kelautan dan perikanan “sangat tinggi”.

Secara terperinci disajikan komponen yang dinilai beserta hasil penilaian komponen pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Komponen Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			TAHUN 2023	TAHUN 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	30,00	26,94
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	20,38	20,10
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,90	11,63
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00	25,00
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	83,29	83,67
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	A

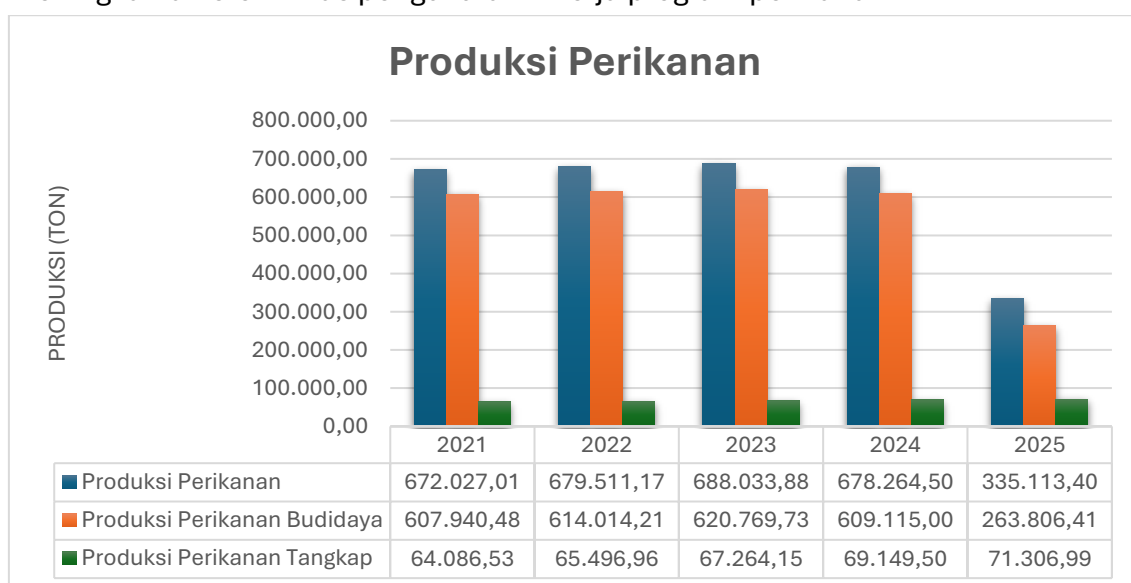
Dari tabel 3.6 diatas dapat dilihat bahwa terdapat empat komponen yang dinilai pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu : 1).Perencanaan Kinerja, 2).Pengukuran Kinerja, 3).Pelaporan Kinerja, dan 4).Evaluasi Kinerja. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan mengalami peningkatan sebesar 0,38 Poin. Jika dilihat perkomponen Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal mengalami Kenaikan sebesar 5 Poin, sedangkan perencanaan, pengukuran dan pelaporan Kinerja mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,06 Poin, 0,28 Poin dan 1,27 Poin. Berikut ini adalah Rekomendasi dan Rencana Aksi Tindak Lanjut atas perbaikan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rekomendasi dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Atas Capaian Penilaian Akuntabilitas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
a.	Dokumen Rencana Kerja agar ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Dokumen Rencana Kerja akan ditetapkan dengan Perkada, Renja 2026 Sudah di ditetapkan melalui Perbup Nomor 163 Tahun 2025
b.	Agar dokumen perencanaan kinerja menyajikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, dan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)	Crosscutting akan disajikan dalam dokumen perencanaan kinerja
c.	Pengukuran kinerja agar menjadi dasar penempatan dan penghapusan jabatan dan Pengukuran kinerja dimanfaatkan dalam penyesuaian anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja	reward dan punishment telah dilaksanakan sesuai dengan aturan pemberian TPP
d.	Agar Laporan Kinerja disusun secara berkala	laporan kinerja akan dibuat pertriwulan
e.	Agar memberikan penjelasan terhadap analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam Laporan Kinerja dan tidak hanya menginfokan efisiensi penggunaan anggaran namun juga menginfokan analisis atas efisiensi penggunaan sumber terkait Sumber Daya Manusia (SDM)	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terkait sumber daya manusia (SDM) akan dijelaskan dalam LjjiP 2025
f.	Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berkenaan dengan beberapa tahun terakhir (bukan hanya tahun sebelumnya) sesuai dengan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014	Laporan realisasi kinerja akan disajikan secara time series sesuai dengan tahun Renstra

2. INDIKATOR KINERJA JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN (RENSTRA 2021-2026)

Pada Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III realisasi produksi perikanan menunjukkan capaian yang belum optimal dibandingkan dengan target awal yang telah ditetapkan. Penyebab utama penyesuaian target ini karena menurunnya produksi perikanan budidaya. Memperhatikan kondisi tersebut, pada Triwulan III dilakukan evaluasi terhadap target produksi perikanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dilakukan penyesuaian target agar lebih mencerminkan potensi produksi yang dapat dicapai hingga akhir tahun. Penyesuaian target ini tidak dimaksudkan untuk menurunkan standar kinerja, melainkan sebagai langkah strategis dalam menjaga akurasi perencanaan serta meningkatkan efektivitas pengukuran kinerja program perikanan.



Gambar 3.1. Produksi Perikanan Tahun 2021-2026

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas kelautan dan perikanan berdasarkan Renstra 2025-2029 (Tabel 3.5) dapat dilihat nilai rata-rata capaian adalah -454,66%. Capaian indikator kinerja laju pertumbuhan produksi perikanan memberikan nilai negatif yang sangat tinggi, dari target laju pertumbuhan produksi perikanan senilai 2% terealisasi sebesar -53,57% (capaian -2678,5%). Sedangkan capaian tertinggi terdapat pada indikator kinerja utama Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring) dengan capaian 133,33%.

3. INDIKATOR KINERJA INDEKS PROFESIONALITAS ASN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (RENSTRA 2025-2029)

Capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa pada tahun 2025 berada pada kategori **sedang** sesuai target yang

ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas aparatur sipil negara telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan pada beberapa aspek penilaian, seperti kualifikasi pendidikan, pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, serta penguatan penilaian kinerja dan disiplin pegawai. Untuk meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN pada periode berikutnya, perangkat daerah akan terus mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN melalui berbagai program pengembangan SDM, pembinaan kinerja, serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan disiplin dan manajemen kinerja ASN.

4. INDIKATOR KINERJA KATEGORI NILAI AKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (RENSTRA 2025-2029)

Capaian indikator kinerja Nilai AKIP pada tahun pelaporan menunjukkan hasil yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target nilai AKIP ditetapkan sebesar A dan berdasarkan hasil evaluasi diperoleh realisasi nilai A, sehingga tingkat capaian indikator kinerja ini mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah berjalan dengan baik, tercermin dari keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran, serta pelaporan kinerja yang mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan akuntabel.

5. INDIKATOR KINERJA PROPORSI RETRIBUSI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP RETRIBUSI DAERAH (RENSTRA 2025-2029)

Capaian indikator **Proporsi Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Retribusi Daerah** pada tahun pelaporan tercatat sebesar **0,23%**, lebih rendah dibandingkan dengan **target yang ditetapkan sebesar 0,32%**, sehingga tingkat capaian indikator ini belum memenuhi target yang direncanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi dari sektor kelautan dan perikanan terhadap total penerimaan retribusi daerah masih relatif terbatas.

Komponen Retribusi/ Pendapatan Asli Daerah dari sektor Kelautan dan Perikanan terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah; retribusi tempat pelelangan ikan; dan retribusi produksi usaha daerah. Capaian masing-masing retribusi dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.8. Realisasi Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2025

No	Jenis Penerimaan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	200.000.000	200.000.000	150.000.000	172.868.900	130.737.100
	- Balai Budidaya Ikan (BBI) Meno	150.000.000	150.000.000	150.000.000	171.500.000	100.000.000
	- Cold Storage dan pabrik es Tanjung Pengamas	50.000.000	50.000.000	-	-	30.000.000

No	Jenis Penerimaan	2021	2022	2023	2024	2025
	- Retribusi sewa bangunan depo pemasaran	-	-	-	1.368.900	737.100
2	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	21.464.000	21.631.000	21.982.000	33.314.000	36.971.000
	- Retribusi Kapal Perikanan (PPI Tjg. Pengamas)	3.406.000	5.091.000	5.635.000	8.109.000	8.491.000
	- Retribusi Orang (PPI Tjg. Pengamas)	7.843.000	8.344.000	7.609.000	12.216.000	13.870.000
	- Retribusi Motor (PPI Tjg. Pengamas)	5.783.000	3.186.000	3.058.000	5.206.000	5.610.000
	- Retribusi Mobil (PPI Tjg. Pengamas)	3.732.000	4.310.000	4.980.000	6.783.000	7.827.000
	- Retribusi Tambat Labuh Kapal Perikanan (TPI Lab. Bua)	700.000	700.000	700.000	1.000.000	1.173.000
3	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	192.650.000	103.212.600	123.045.000	130.814.000	124.875.000
	- Benih Ikan Karper (BBIAT)	40.000.000	26.400.000	32.870.000	28.250.000	21.850.000
	- Benih Ikan Nila Gift (BBIAT)	87.750.000	57.162.600	66.800.000	76.564.000	55.850.000
	- Benih Ikan Tawes (BBIAT)	29.700.000	19.650.000	23.375.000	26.000.000	18.150.000
	- Benih ikan lele (BBI)					1.400.000
	- Produksi Udang (Tambak Percontohan)	35.200.000	-	-	-	-
	- Ikan Konsumsi	-	-	-	-	22.775.000
	- Induk Ikan Afkir	-	-	-	-	4.850.000
	JUMLAH	414.114.000	324.843.600	295.027.000	336.996.900	292.583.100

Dari data pada tabel diatas dapat dilihat adanya penurunan realisasi retribusi pada tahun 2025, Rendahnya pencapaian ini disebabkan oleh keterlambatan pembayaran penyewaan Balai Benih Ikan (BBI) meno, yang seharusnya jatuh tempo pada bulan Desember. Meskipun capaian indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan, Dinas Kelautan dan Perikanan tetap berupaya melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah, antara lain melalui:

- optimalisasi pemanfaatan fasilitas dan sarana prasarana perikanan;
- peningkatan pelayanan kepada pelaku usaha perikanan;
- penguatan pengawasan terhadap pemungutan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; serta
- peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam pengelolaan potensi retribusi sektor kelautan dan perikanan.

6. INDIKATOR KINERJA LAJU PERTUMBUHAN PRODUKSI PERIKANAN (RENSTRA 2025-2029)

Laju Pertumbuhan Perikanan Kabupaten Sumbawa membandingkan antara produksi perikanan pada tahun 2025 dengan produksi tahun 2024 menunjukkan nilai negatif sebesar -53,57%. Nilai pertumbuhan negatif tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan produksi perikanan dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 dengan 2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3.9. Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 – 2025

Total Produksi	2022	2023	2024	2025
Produksi Perikanan	679.511,17	688.033,88	678.264,50	335.113,40
Produksi Perikanan Tangkap	65.496,96	67.264,15	69.149,50	71.306,99
Produksi Perikanan Budidaya	614.014,21	620.769,73	609.115,00	263.806,41

Dari data tabel 3.9 diatas dapat dilihat pada periode 2021–2023, produksi perikanan menunjukkan tren peningkatan, dari 672.027,01 ton pada tahun 2021 menjadi 688.033,88 ton pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas produksi baik pada subsektor perikanan tangkap maupun budidaya. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan produksi menjadi 678.264,50 ton atau turun sekitar 1,42% dibandingkan tahun 2023. Selanjutnya pada **tahun 2025**, total produksi tercatat sebesar **335.113,40 ton**, yang menunjukkan penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Produksi perikanan budidaya merupakan kontributor terbesar terhadap total produksi perikanan. Penurunan produksi perikanan budidaya pada tahun 2025 sangat berdampak langsung terhadap capaian Produksi Perikanan tahun 2025. Produksi budidaya tahun 2025 tercatat sebesar 263.806,41 ton turun sebesar 53,57% dari produksi perikanan budidaya tahun 2024 yaitu sebesar 609.115 Ton.

Secara terperinci realisasi pencapaian produksi perikanan Tangkap, Perikanan budidaya dan olahan hasil perikanan tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10 Komposisi Produksi Perikanan Tahun 2022 - 2024

Produksi	Produksi (Ton)			
	2022	2023	2024	2025
Perikanan Tangkap	65.496,96	67.264,15	69.149,50	71.306,99
Budidaya Perikanan	615.244,13	620.775,71	609.111,05	263.806,42
- Budidaya Rumput Laut	474.000,00	475.002,49	457.920,00	153.867,51

Produksi	Produksi (Ton)			
	2022	2023	2024	2025
- Budidaya Kerapu	407,00	430,00	420,00	453,09
- Budidaya Mutiara	2,20	2,40	2,53	2,61
- Budidaya Bawal Bintang	-	3,52	3,35	4,10
- Budidaya Lobster	-	0,06	0,50	0,36
- Budidaya Udang	135.038,39	139.201,35	144.453,00	102.766,28
- Budidaya Bandeng	4.840,00	4.500,00	4.563,00	4.766,72
- Budidaya Ikan Air Tawar	956,54	1.635,89	1.748,67	1.945,75
Olahan Hasil Perikanan	10.331,00	11.291,00	12.129,00	11.097,00

Dilihat dari tabel diatas penurunan produksi perikanan budidaya tertinggi terjadi pada komoditas Rumput Laut dan komoditas Udang dengan masing-masing penurunan produksi sebesar 304.052,49 ton untuk komoditas Rumput Laut dan 416.86,72 Ton untuk komoditas Udang. Penurunan produksi budidaya Rumput Laut ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Terdapat beberapa lokasi yang merupakan sentra sudah tidak berkegiatan di bidang budidaya rumputlaut akibat dari turunnya Kualitas perairan,
2. Penurunan Kualitas Bibit (Degradasi Mutu) : Penggunaan bibit yang dilakukan secara terus-menerus dari hasil panen sebelumnya (kloning berulang) tanpa adanya peremajaan menyebabkan penurunan kualitas genetik.
3. Serangan Hama Dan Penyakit : serangan penyakit Ice-Ice. Penyakit ini ditandai dengan memutihnya sebagian thallus (batang) rumput laut yang kemudian menjadi lunak dan terputus.
4. Harga rumput laut yang berfluktuasi di tingkat petani juga mempengaruhi minat pembudidaya dalam melakukan kegiatan budidaya. Ketika harga jual menurun, sebagian pembudidaya mengurangi luas area tanam atau menunda siklus produksi sehingga berdampak pada menurunnya total produk
5. Sebagian pembudidaya rumput laut melakukan penyesuaian usaha dengan beralih ke komoditas budidaya lainnya bahkan terdapat beberapa pembudidaya rumput laut yang beralih ke sektor pertanian yang dianggap lebih stabil secara ekonomi.

Sedangkan Penurunan produksi budidaya Udang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Serangan Penyakit pada Budidaya Udang
2. Biaya produksi budidaya udang relatif tinggi, terutama untuk kebutuhan pakan, benur (benih udang), serta obat-obatan menyebabkan sebagian pembudidaya mengurangi intensitas budidaya atau menurunkan padat tebar sehingga berdampak pada penurunan produksi.

3. Perubahan cuaca yang tidak menentu dapat mempengaruhi kondisi tambak serta kestabilan kualitas air. Curah hujan tinggi atau perubahan suhu ekstrem dapat menyebabkan stres pada udang sehingga meningkatkan risiko kematian.
4. Adanya kasus paparan **Cesium-137** di wilayah tertentu pada produk ekspor Udang yang berdampak pada sebagian pembudidaya udang mengurangi atau menunda kegiatan budidaya sebagai langkah kehati-hatian, serta menurunnya permintaan ekspor Udang dari Indonesia.

7. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PELAKU USAHA YANG DINILAI PATUH TERHADAP REGULASI (BERDASARKAN HASIL AUDIT/MONITORING) (RENSTRA 2025-2029)

Capaian indikator kinerja Persentase Pelaku Usaha yang dinilai patuh terhadap Regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring) pada tahun pelaporan menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan sebesar 75% Pelaku Usaha yang dinilai patuh terhadap Regulasi, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pelaku usaha yang menjadi objek audit atau monitoring telah memenuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, sosialisasi regulasi, serta pengawasan secara berkala kepada pelaku usaha. Selain itu, peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan juga turut mendorong terciptanya praktik usaha yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

B. PEMBANDINGAN ANTARA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024 DAN 2023

Perkembangan capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa dari tahun 2023 hingga 2025 dilihat secara lengkap pada Tabel sebagaimana berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja			Naik (+)/ Turun (-) Tahun 2025 dibanding 2024	Keterangan
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	Tercapainya Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori	A	A	A	Tetap	Berdasarkan Renstra 2021 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja			Naik (+)/ Turun (-) Tahun 2025 dibanding 2024	Keterangan
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
2	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	688.033,88	678.264,50	335.113,40	Turun	
3	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pelayanan PD	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori	-	Sedang	Sedang	Tetap	Berdasarkan Renstra 2025 - 2029
		Kategori AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori	A	A	A	Tetap	
		Proporsi retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah	%	2,83	3,13	0,23	Turun	
4	Meningkatnya Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	Laju Peningkatan Produksi Perikanan	%	1,25	-1,42	-53,57	Turun	
5	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perikanan dan kelautan	Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring)	%	-	-	100	Naik	

Dari data pada tabel diatas diatas dapat dilihat bahwa:

1. Capaian Indikator Kinerja Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 dibandingkan dengan capaian 2024 tidak mengalami perubahan yaitu Kategori Nilai A.
2. Capaian Indikator Produksi Perikanan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 343.151,10 ton dibandingkan dengan tahun 2024, penurunan produksi ini juga berimplikasi terhadap laju pertumbuhan produksi perikanan yang mencapai penurunan sebesar 53.57 %
3. Capaian Indikator Kategori Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 dibandingkan dengan capaian 2024 tidak mengalami perubahan yaitu Kategori Nilai sedang.
4. Capaian Indikator Proporsi retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 2,9% dari tahun 2024.
5. Capaian Kinerja Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring) merupakan indikator baru yang dilaksanakan pada tahun 2025, capaian indikator ini mencapai 100% dari target 75 % pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring).

C. PEMBANDINGAN ANTARA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 2029

Realisasi Indikator kinerja Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir RENSTRA (2021-2026) dapat dilihat pada Tabel Dibawah ini:

Tabel 3.12 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra (2029)	Realisasi Tahun (2025)	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pelayanan PD	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori	Sedang	Sedang	Tecapai
		Kategori AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori	A	A	Tecapai
		Proporsi retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah	%	0,23	0,23	Tercapai
2	Meningkatnya Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	Laju Peningkatan Produksi Perikanan	%	2,2	-53,57	Belum Tercapai
3	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perikanan dan kelautan	Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring)	%	75	100	Tercapai (Melebihi Target Renstra 2029)

D. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN KINERJA PROVINSI DAN TARGET NASIONAL TAHUN 2024

Berdasarkan tabel 3.11 capaian indikator peningkatan kategori nilai SAKIP baik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sama-sama memperoleh predikat A (baik).

Tabel 3.13 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Kinerja Provinsi Dan Target Nasional Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi PemProv Tahun 2025	Target Nasional Tahun 2025	Ket.
1	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pelayanan PD	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori	Sedang	-	-	
		Kategori AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori	A	A	A	
		Proporsi retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah	%	0,23	-	-	
2	Meningkatnya Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	Laju Peningkatan Produksi Perikanan	%	-53,57	-	-	
3	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perikanan dan kelautan	Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring)	%	100	-	-	

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Strategi pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Sumbawa dan analisis tingkat capaian sasaran strategis serta indikator kinerja dipaparkan pada tabel dibawah ini

Tabel 3.14 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Analisis Penyebab Tingkat Capaian	Alternatif Solusi/Strategi
1	Meningkatnya Kualitas penyelenggara an Pelayanan PD	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD	100,00	Capaian Indikator Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD Sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dapat dikatakan bahwa pemenuhan empat dimensi Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Sudah Sesuai.	Meningkatkan Kualitas dan pengembangan Kompetensi ASN dengan pelatihan pelatihan teknis, serta pengutana Budaya kerja Disiplin.
		Kategori AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	100,00	Masih terdapat beberapa catatan atas kekurangan untuk melakukan perbaikan manajemen kinerja sesuai laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2024 pada perangkat daerah	Menindaklanjuti rekomendasi terhadap hasil penilaian AKIP tahun 2024
		Proporsi retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah	71,88	Adanya Keterlambatan pembayaran sewa Balai Benih Ikan Sehingga capaian Retribusi pada tahun 2025 Tidak mencapai Target yang ditetapkan	optimalisasi pemanfaatan fasilitas dan sarana prasarana perikanan, peningkatan pelayanan kepada pelaku usaha perikanan, penguatan pengawasan terhadap pemungutan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; serta peningkatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Analisis Penyebab Tingkat Capaian	Alternatif Solusi/Strategi
					koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam pengelolaan potensi retribusi sektor kelautan dan perikanan.
2	Meningkatnya Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	Laju Peningkatan Produksi Perikanan	(2.678,50)	Menurunnya Produksi Perikanan Budidaya terutama pada Komoditas Udang dan Rumput Laut yang sangat signifikan	Budidaya Rumput Laut: - Perbaikan Bibit Unggul (Bibit Kultur Jaringan, - Penerapan Teknologi Budidaya Rumput Laut - Hilirisasi Produk Rumput Laut Budidaya Udang : - Bantuan benih unggul udang - Perbaikan tambak eksisting (Revitalisasi) - Pelatihan teknis intensif - Pengembangan kawasan budidaya terpadu - Hilirisasi industri
				Meningkatnya kualitas pembinaan yang berdampak kepada peningkatan motivasi usaha nelayan dalam memanfaatkan teknologi penangkapan ikan;	Meningkatkan pembinaan dalam bimbingan teknis teknologi anjuran untuk nelayan khususnya skala kecil menengah serta pembinaan kemandirian kelompok dalam pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah PISDKP dan Penyuluh Perikanan;

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Analisis Penyebab Tingkat Capaian	Alternatif Solusi/Strategi
3	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perikanan dan kelautan	Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring)	133,33	Tingginya capaian Indikator ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran pelaku usaha perikanan terhadap Regulasi yang berlaku,	Optimalisasi pengawasan terhadap Pelaku Usaha perikanan dengan tetap memastikan kepatuhan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan

Beberapa upaya untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.15 Program dan Kegiatan Sasaran Strategis Untuk Indikator Kinerja Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan

No	Program	Kegiatan
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota



Gambar 3.2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Penyerahan Bantuan Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN TAHUN 2025

1) Analisis dan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pembagian alokasi anggaran pada masing-masing indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan dapat Dilihat Pada Tabel Berikut ini:

Tabel 3.16 Proporsi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	PROPORSI ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	Rp 14.200.000,00	0,10
		Kategori AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Kategori)	Rp 8.969.853.518,00	62,39
		Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perikanan (%)	-	-
2	Meningkatnya Produksi Usaha Sektor Perikanan	Laju Peningkatan Produksi Perikanan (%)	Rp 5.350.372.689,00	37,22

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	PROPORSI ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5
3	Tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan	Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring) (%)	Rp 41.565.000,00	0,29

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa pada Tahun Anggaran 2024 proporsi anggaran untuk indikator kinerja Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (62,39%) dibandingkan dengan indikator lainnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa alokasi anggaran lebih dominan diarahkan pada program dan kegiatan yang mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan, seperti perencanaan kinerja, pengendalian, evaluasi, serta pelaporan. Upaya ini berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi. Namun demikian, tingginya capaian pada indikator Nilai AKIP belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada indikator Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas alokasi anggaran dalam mendorong kinerja sektor riil, khususnya subsektor perikanan, masih perlu ditingkatkan.

Dari sisi efisiensi, kondisi ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan antara belanja penunjang (supporting) dengan belanja yang secara langsung berdampak pada output dan outcome pembangunan sektor perikanan. Apabila kondisi ini berlanjut, maka terdapat risiko tidak optimalnya pencapaian sasaran strategis daerah, khususnya dalam peningkatan produksi dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Berikut ini analisis kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran tahun 2024 dalam tabel Berikut ini:

Tabel 3.17 Efisiensi Penggunaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran Renstra Tahun 2025	Capaian anggaran DPPA 2025	Besar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
Terwujudnya Peningkatan Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Mendukung Industri/agroindustri dalam Perekonomian Wilayah					Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN (poin)	Indeks	13.000.000	14.200.000	12.450.000	95,77	87,68	-8,09	91,55
	Meningkatnya kompetensi, kinerja dan disiplin ASN PD				Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori	13.000.000	14.200.000	12.450.000	95,77	87,68	-8,09	91,55
	X.XX.01	Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota			Indeks Profesionalitas ASN PD	Poin	13.000.000	14.200.000	12.450.000	95,77	87,68	-8,09	91,55
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD (Dokumen)	Dokumen	13.000.000	14.200.000	12.450.000,	95,77	87,68	-8,09	91,55
			X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Dokumen	13.000.000	14.200.000	12.450.000	95,77	87,68	-8,09	91,55
Terwujudnya Peningkatan Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Mendukung Industri/agroindustri dalam Perekonomian Wilayah					Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Angka)	Angka	8.278.410.545	8.969.853.518	8.625.089.915	104,19	96,16	-8,03	92,29
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja serta Evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan				Kategori AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori	8.278.410.545	8.969.853.518	8.625.089.915	104,19	96,16	-8,03	92,29
	X.XX.01	Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota			Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai	8.278.410.545	8.969.853.518	8.625.089.915	104,19	96,16	-8,03	92,29

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran Renstra Tahun 2025	Capaian anggaran DPPA 2025	Besar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dinas Kelautan dan Perikanan	Dokumen	57.076.000	60.176.000,00	56.854.614,00	99,61	94,48	-5,13	94,85
			X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Dokumen	32.891.000	34.091.000	32.341.000	98,33	94,87	-3,46	96,48
			X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1.659.600	1.659.600	1.659.600	100,00	100,00	0,00	100,00
			X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1.350.600	1.350.600	1.350.600	100,00	100,00	0,00	100,00
			X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2.030.600	2.030.600	2.030.600	100,00	100,00	0,00	100,00
			X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1.680.600	1.680.600	1.680.600	100,00	100,00	0,00	100,00

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran Renstra Tahun 2025	Capaian anggaran DPPA 2025	Besar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
			X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2.193.000	2.193.000	2.193.000	100,00	100,00	0,00	100,00
			X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	Laporan	15.270.600	17.170.600	15.599.214	102,15	90,85	-11,30	88,93
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan PD		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan	Dokumen	6.919.048.015	7.079.729.338	6.843.540.047	98,91	96,66	-2,24	97,73
			X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	6.834.051.595	6.994.732.918	6.766.493.627	99,01	96,74	-2,27	97,70
			X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	81.914.500	81.914.500	73.964.500	90,29	90,29	0,00	100,00
			X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3.081.920	3.081.920	3.081.920	100,00	100,00	0,00	100,00

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran Renstra Tahun 2025	Capaian anggaran DPPA 2025	Besar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
		X.XX.01.2.03	Administrasi BMD pada PD		Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada PD yang disusun	Dokumen	18.456.000	18.456.000	12.527.885	67,88	67,88	0,00	100,00
			X.XX.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan BMD SKPD	Dokumen	17.086.000	17.086.000	11.182.720	65,45	65,45	0,00	100,00
			X.XX.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Laporan	1.370.000	1.370.000	1.345.165	98,19	98,19	0,00	100,00
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum PD		Jumlah Dokumen Administrasi Umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Dokumen	116.907.900	347.440.650	341.355.572	291,99	98,25	-193,74	33,65
			X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	94.437.500	203.255.650	200.986.632	212,83	98,88	-113,94	46,46
			X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	9.345.000	9.345.000	5.874.300	62,86	62,86	0,00	100,00
			X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	11.700.000	11.700.000	11.700.000	100,00	100,00	0,00	100,00
			X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.425.400	123.140.000	122.794.640	8.614,75	99,72	-8.515,03	1,16

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran Renstra Tahun 2025	Capaian anggaran DPPA 2025	Besar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda pada PD yang disusun	Dokumen	195.570.500	252.770.500	187.626.087	95,94	74,23	-21,71	77,37
			X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	18.945.500	20.145.500	18.146.588	95,78	90,08	-5,71	94,04
			X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	172.525.000	228.525.000	165.383.579	95,86	72,37	-23,49	75,50
			X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4.100.000	4.100.000	4.095.920	99,90	99,90	0,00	100,00
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Dokumen	971.352.130	1.211.281.030	1.183.185.700	121,81	97,68	-24,13	80,19
			X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	345.736.050	390.673.500	370.029.578	107,03	94,72	-12,31	88,50

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran Renstra Tahun 2025	Capaian anggaran DPPA 2025	Besar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
			X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	625.616.080	820.607.530	813.156.132	129,98	99,09	-30,88	76,24
Terwujudnya Peningkatan Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Mendukung Industri/agroindustri dalam Perekonomian Wilayah					Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan (ADHK)	Poin	4.638.151.369	5.391.937.689	5.199.708.400	112,11	96,43	-15,67	86,02
	Meningkatnya Produksi Usaha Sektor Perikanan				Laju Peningkatan Produksi Perikanan	%	4.389.841.180	5.106.742.500	4.932.893.573	112,37	96,60	-15,77	85,96
	3.25.03	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			Laju Produksi Perikanan Tangkap	%	2.322.322.680	2.566.780.000	2.447.452.338	105,39	95,35	-10,04	90,48
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota		Jumlah sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap di perairan umum (unit)	Unit	150.570.000	150.570.000	148.555.130	98,66	98,66	0,00	100,00
			3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	150.570.000	150.570.000	148.555.130	98,66	98,66	0,00	100,00
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab/Kota		Jumlah nelayan kecil yang terbina (Orang)	orang	1.999.527.680	2.243.985.000	2.135.233.991	106,79	95,15	-11,63	89,11
			3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	1.993.067.680	2.237.525.000	2.132.681.771	107,00	95,31	-11,69	89,07
			3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit Usaha	6.460.000	6.460.000	2.552.220	39,51	39,51	0,00	100,00

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran Renstra Tahun 2025	Capaian anggaran DPPA 2025	Besar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
		3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah TPI yang operasional (unit)	Unit	157.135.000	157.135.000	149.251.847	94,98	94,98	0,00	100,00
			3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	157.135.000	157.135.000	149.251.847	94,98	94,98	0,00	100,00
		3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota		Dokumen Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) (Rekomendasi)	Rekomendasi	15.090.000	15.090.000	14.411.370	95,50	95,50	0,00	100,00
			3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Rekomendasi	15.090.000	15.090.000	14.411.370	95,50	95,50	0,00	100,00
	3.25.04	PENGLOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			Laju Produksi Perikanan Budidaya	%	2.067.518.500	2.539.962.500	2.485.441.235	120,21	97,85	-22,36	81,40
		3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota		Jumlah Rekomendasi sertifikat Standar yang terbit	Rekomendasi	18.806.500	20.006.500	18.158.500	96,55	90,76	-5,79	94,00

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran Renstra Tahun 2025	Capaian anggaran DPPA 2025	Besar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
			3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Rekomendasi	18.806.500	20.006.500	18.158.500	96,55	90,76	-5,79	94,00
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil laki-laki dan perempuan yang memperoleh pemberdayaan (kelompok)	Kelompok	12.585.000	12.610.000	12.594.000	100,07	99,87	-0,20	99,80
			3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	3.700.000	4.525.000	4.517.000	122,08	99,82	-22,26	81,77

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran Renstra Tahun 2025	Capaian anggaran DPPA 2025	Besar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
			3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Diklat	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	8.885.000	8.085.000	8.077.000	90,91	99,90	9,00	109,89
		3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota		jumlah Sertifikat Standar bagi pembudidaya ikan Skala Kecil/ yang diterbitkan (Dokumen)	Dokumen	3.895.000	3.895.000	2.785.000	71,50	71,50	0,00	100,00
			3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekomendasi	3.895.000	3.895.000	2.785.000	71,50	71,50	0,00	100,00
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah sarana dan prasarana pembudidayaan ikan yang dimanfaatkan/ terbangun/ terehabilitasi	unit	2.032.232.000	2.503.451.000	2.451.903.735	120,65	97,94	-22,71	81,18
			3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Dokumen	11.524.000	11.524.000	11.516.250	99,93	99,93	0,00	100,00

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran Renstra Tahun 2025	Capaian anggaran DPPA 2025	Besar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
			3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1.054.457.000	1.029.257.000	1.004.077.817	95,22	97,55	2,33	102,45
			3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	4.609.000	4.609.000	4.609.000	100,00	100,00	0,00	100,00
			3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	961.642.000	1.458.061.000	1.431.700.668	148,88	98,19	-50,69	65,95
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan				Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/ monitoring)	%	248.310.189	285.195.189	266.814.831	107,45	93,56	-13,90	87,07
	3.25.05	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			Cakupan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang terawasi Berdasarkan Kewenangan Kabupaten	%	37.620.000	41.565.000	37.885.965	100,71	91,15	-9,56	90,51

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran Renstra Tahun 2025	Capaian anggaran DPPA 2025	Besar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kab/Kota		Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	37.620.000	41.565.000	37.885.965	100,71	91,15	-9,56	90,51
			3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	19.675.000	22.420.000	20.608.635	104,75	91,92	-12,82	87,76
			3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	2.570.000	2.570.000	2.508.635	97,61	97,61	0,00	100,00
			3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	15.375.000	16.575.000	14.768.695	96,06	89,10	-6,95	92,76
	3.25.06	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			Laju Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	210.690.189	243.630.189	228.928.866	108,66	93,97	-14,69	86,48

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran Renstra Tahun 2025	Capaian anggaran DPPA 2025	Besar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
		3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Jumlah unit usaha yang memiliki rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Unit Usaha)	Unit Usaha	19.485.000	19.485.000	18.798.660	96,48	96,48	0,00	100,00
			3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	19.485.000	19.485.000	18.798.660	96,48	96,48	0,00	100,00
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang memenuhi standar kelayakan pengolahan (unit usaha)	Unit Usaha	15.505.000	16.705.000	14.913.670	96,19	89,28	-6,91	92,82

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran Renstra Tahun 2025	Capaian anggaran DPPA 2025	Besar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
			3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	15.505.000	16.705.000	14.913.670	96,19	89,28	-6,91	92,82
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota		Jumlah angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	kg/kapita/tahun	175.700.189	207.440.189	195.216.536	111,11	94,11	-17,00	84,70
			3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	15.725.000	47.465.000	45.183.553	287,34	95,19	-192,14	33,13
			3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	159.975.189	159.975.189	150.032.983	93,79	93,79	0,00	100,00

2) Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Manusia (SDM)

Efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung pencapaian indikator kinerja organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi, pemanfaatan SDM pada perangkat daerah telah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pelaksanaan Analisis Beban Kerja (ABK). ABK merupakan instrumen manajerial yang digunakan untuk menghitung kebutuhan jumlah dan distribusi pegawai berdasarkan beban tugas yang ada dalam suatu organisasi.

Dalam konteks pencapaian kinerja, ABK berfungsi sebagai dasar dalam memastikan bahwa pemanfaatan SDM dilakukan secara tepat jumlah, tepat kompetensi, dan tepat distribusi. Dengan demikian, efisiensi SDM hanya dapat dicapai apabila organisasi telah menyusun dan menerapkan ABK secara optimal.

Tabel 3.18 Analisis Beban Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

No.	Jabatan	Jumlah	ABK	Kelebihan /Kekurangan
I	STRUKTURAL	23	31	-8
1	Kepala dinas	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
3	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	1	1	0
4	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	1	1	0
5	Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan	1	1	0
6	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	1	0
7	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	1	1	0
8	Kepala UPTD	11	12	-1
9	Kepala Tata Usaha (UPT)	5	12	-7
II	JABATAN FUNGSIONAL	17	63	-46
1	JF Perencana	0	3	-3
2	JF Analis Kebijaka	0	3	-3
3	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah	1	3	-2
4	JF Arsiparis	0	3	-3
5	JF Pranata Komputer	0	3	-3
6	JF Pranata SDM Aparatur	0	3	-3
7	JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	3	9	-6
8	JF Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	1	1	0
9	JF Analis Akuakultur	4	9	-5
10	JF Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	1	1	0
11	JF Pengawas Perikanan	2	13	-11
12	JF Analis Pasar Hasil Perikanan	2	5	-3
13	JF Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3	7	-4

No.	Jabatan	Jumlah	ABK	Kelebihan /Kekurangan
III	PELAKSANA	44	133	-89
1	Operator Layanan Operasional	12	27	-15
2	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	2	21	-19
3	Penata Layanan Operasional	15	17	-2
4	Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	0	2	-2
5	Penelaah Teknis Kebijakan	3	5	-2
6	Pengadministrasi Perkantoran	5	28	-23
7	Pengelola Layanan Operasional	1	1	0
8	Pengelola Umum Operasional	3	3	0
9	Pengolah Data dan Informasi	3	29	-26
	TOTAL	84	227	-143

Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) pada masing Masing jabatan masih mengalami kekurangan pegawai. Pejabat Struktural kekurangan 8 Pegawai, dari 31 pegawai yang dibutuhkan sudah terisi 23 Pegawai. Untuk pejabat fungsional jumlah pegawai yang dibutuhkan 63 orang sesuai dengan ABK tahun 2025 dan sudah terisi sebanyak 17 pegawai. Sedangkan untuk Pejabat Pelaksana pegawai yang dibutuhkan sebanyak 133 pegawai dan jumlah pegawai yang menjabat sebesar 44 pegawai (masih kurang 89 pegawai).

G. ANALISIS PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.19 Analisis Capaian Program Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Capaian	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan (Kinerja Tidak Mencapai Target/ Realisasi Anggaran Rendah)	Upaya Mengatasi Permasalahan Terkait Kinerja
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	100	Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota	Indeks Profesionalitas ASN PD	76,00	72,92	95,95	Masih ada kebingungan dalam menggunakan aplikasi manajemen kepegawaian yang sering mengalami pembaruan (update). Kurangnya kesadaran bahwa IP ASN adalah rapor profesionalitas individu, sehingga pegawai cenderung pasif dalam memperbarui data mandiri.	Sosialisasi aturan disiplin untuk meminimalisir pelanggaran yang dapat memotong poin dimensi disiplin.

No	Sasaran	Indikator	Capaian	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan (Kinerja Tidak Mencapai Target/ Realisasi Anggaran Rendah)	Upaya Mengatasi Permasalahan Terkait Kinerja
		Kategori AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Kategori)	100	Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota	Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	84,6	83,67	98,90	Terjadinya Penurunan Nilai 3 Aspek Penilaian AKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran kinerja dan Pelaporan Kinerja. - Perencanaan Kinerja belum menyajikan informasi tentang hubungan Kinerja , Strategi dan Aktivitas antar bidang /dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) - Pengukuran Kinerja Belum Menjadi dasar Penempatan/Penghapusan Jabatan (Reward dan Punishment), serta Belum dimanfaatkan dalam penyesuaian anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja - Laporan Kinerja masih berorientasi pada efisiensi penggunaan anggaran dan belum menginfokan analisis atas efisiensi penggunaan Sumber daya terkait SDM - Laporan Kinerja belum menginformasikan	akan menindaklanjuti catata atas Kekurangan Serta melaksanakan Rekomendasi yang diberikan

No	Sasaran	Indikator	Capaian	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan (Kinerja Tidak Mencapai Target/ Realisasi Anggaran Rendah)	Upaya Mengatasi Permasalahan Terkait Kinerja
									perbandingan realisasi kinerja tahun berkenaan dengan Beberapa Tahun Terakhir	

No	Sasaran	Indikator	Capaian	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan (Kinerja Tidak Mencapai Target/ Realisasi Anggaran Rendah)	Upaya Mengatasi Permasalahan Terkait Kinerja
2	Meningkatnya Produksi Usaha Sektor Perikanan	Laju Peningkatan Produksi Perikanan (%)	-2678,5	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Laju Produksi Perikanan Tangkap	2,4	3,12	1,30	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Ini dipengaruhi oleh Beberapa hal : - Modernisasi Teknologi Penangkapan Ikan, Misalnya penggunaan GPS dan Fish Finder yang memungkinkan Nelayan menemukan gerombolan ikan dengan akurasi Tinggi - Meningkatnya kualitas pembinaan yang berdampak kepada peningkatan motivasi usaha nelayan dalam memanfaatkan teknologi penangkapan ikan;	Meningkatnya kualitas pembinaan yang berdampak kepada peningkatan motivasi usaha nelayan dalam memanfaatkan teknologi penangkapan ikan;

No	Sasaran	Indikator	Capaian	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan (Kinerja Tidak Mencapai Target/ Realisasi Anggaran Rendah)	Upaya Mengatasi Permasalahan Terkait Kinerja
				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Laju Produksi Perikanan Budidaya	1,9	-56,69	-2983,68	Menurunnya produksi perikanan Budidaya Terdapat pada Komoditas rumput laut dan udang. Adapun penyebab turunnya produksi rumput laut adalah terdapat beberapa lokasi yang merupakan sentra sudah tidak berkegiatan di bidang budidaya rumput laut akibat dari turunnya Kualitas perairan Sentra Rumput laut yang sudah Kualitas bibit dan rendahnya harga jual rumput laut, serta tidak adanya dukungan program baik APBD (DAK) maupun APBN . Turunnya produksi Udang disebabkan oleh adanya Isu Cesium pada trwulan 3 dan 4 yahun 2025 sehingga menyebabkan pembudidaya yang berorientasi ekspor menunda waktu tebar udang.	Peremajaan Benih/ bibit rumput laut Baru dengan Bibit Hasil Kultur Jaringan, Berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan perikanan Terkait Kepastian persyaratan ekspor Udang, dan menginformasikan ketentuan ekspor tersebut kepada pembudidaya ekspor Sehingga pembudidaya tidak ragu dalam melakukan kegiatan budidayanya

No	Sasaran	Indikator	Capaian	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan (Kinerja Tidak Mencapai Target/ Realisasi Anggaran Rendah)	Upaya Mengatasi Permasalahan Terkait Kinerja
				Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Laju Produksi Olahan Hasil Perikanan	2	-8,51	-425,50	Penurunan Laju Produksi olahan ini di pengaruhi karena menurunnya produksi Perikanan Budidaya. Beberapa upaya untuk mengoptimalkan Kinerja program ini antara Lain: - Diversifikasi Produk dan Inovasi - Penguatan Infrastruktur Rantai Dingin (Cold Chain) - Sertifikasi Halal dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	- fasilitasi Pendampingan dan pelatihan Pembuatan Produk Difersifikasi Seperti Pembuatan Bakso Ikan, Nugget ikan, Abon, dll - Fasilitasi Pendampingan penerbitan Sertifikasi Halal dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
3	Tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan	Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring) (%)	133,33	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang terawasi Berdasarkan Kewenangan Kabupaten	74	100	135,14	- Pengawasan di perairan umum daratan (sungai, danau, waduk, dan rawa) masih menjadi ranah kabupaten. - Pengawasan terhadap kepatuhan administratif nelayan kecil (di bawah 5 GT) yang domisilinya berada di wilayah kabupaten tersebut. - Pengawasan terhadap unit pengolahan ikan (UPI) skala mikro dan kecil serta pasar ikan di wilayah setempat.	Pemerintah Kabupaten perlu fokus pada Penguatan POKWASMAS dan Optimalisasi Pengawasan di Sektor Hilir (pasar dan pengolahan). Karena secara hukum wilayah laut bukan lagi kewenangan kabupaten, maka fokus utama beralih ke darat dan perairan umum.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, tingkat pencapaian kinerja menunjukkan hasil yang bervariasi antar indikator. Secara umum, terdapat indikator yang berhasil mencapai bahkan melampaui target, namun terdapat pula indikator yang belum mencapai target secara optimal. Pada sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah**, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh:

- **Indeks Profesionalitas ASN PD** dengan capaian 100%;
- **Kategori AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan** yang mencapai target dengan capaian 100%;
- Meskipun demikian, indikator **Proporsi retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah** hanya mencapai 71,88%, sehingga masih perlu ditingkatkan.

Pada sasaran strategis **Meningkatnya Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan**, capaian indikator **Laju Peningkatan Produksi Perikanan** menunjukkan hasil yang sangat rendah, dengan capaian sebesar **-2.678,50%**. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan produksi yang signifikan dibandingkan target yang telah ditetapkan, sehingga menjadi perhatian utama dalam evaluasi kinerja. Sementara itu, pada sasaran strategis **Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Peraturan Perikanan dan Kelautan**, indikator **Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi** menunjukkan capaian yang sangat baik, yaitu sebesar **133,33%**, yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian kinerja belum merata. Keberhasilan lebih dominan pada indikator yang bersifat tata kelola dan kepatuhan, sedangkan indikator yang berorientasi pada outcome sektor riil, khususnya produksi perikanan, belum tercapai secara optimal.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kinerja antara lain:

- Optimalnya pelaksanaan fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi;
- Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi;
- Dukungan SDM pada aspek administrasi dan pengawasan.

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi rendahnya capaian kinerja, khususnya pada indikator produksi perikanan, antara lain:

- Penurunan hasil produksi akibat faktor eksternal (cuaca, kondisi lingkungan, atau pasar);
- Keterbatasan sarana dan prasarana produksi;
- Belum optimalnya dukungan anggaran dan SDM teknis lapangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi mendalam terhadap faktor penyebab penurunan produksi perikanan;
2. Meningkatkan dukungan program dan kegiatan yang berorientasi pada

- peningkatan produksi;
3. Mengoptimalkan peran SDM teknis dan penyuluh perikanan;
 4. Menyeimbangkan alokasi sumber daya antara aspek tata kelola dan sektor produktif.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 dikelola langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 14.375.991.207,- meliputi belanja pegawai Rp. 7.009.732.918,-; belanja barang dan jasa sebesar Rp. 6.277.915.139,- dan belanja modal Rp. 1.088.343.150,-. Realisasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa mencapai Rp. 13.837.248.319,- (96,25%), yang terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp. 6.776.693.627,- (95,99%); belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.977.542.163,- (99,51%); dan belanja modal Rp. 1.083.012.529,- (96,25%).

Tabel 3.20 Realisasi Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

No	Belanja	Pagu Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	%
1	Belanja Operasional	13.287.648.057	12.754.235.790	533.412.267	95,99
	Belanja Pegawai	7.009.732.918	6.776.693.627	233.039.291	96,68
	Belanja Barang dan Jasa	6.277.915.139	5.977.542.163	300.372.976	95,22
2	Belanja Modal	1.088.343.150	1.083.012.529	5.330.621	99,51
	Total	14.375.991.207	13.837.248.319	660.795.715	96,25

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Sumbawa Tahun 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, maka disajikan jumlah Pagu dan Realisasi anggaran program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2025, berdasarkan DPPA tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.21 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kompetensi, kinerja dan disiplin ASN PD				Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori	Sedang	Sedang	100,00	14.200.000	12.450.000	87,68
	Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota			Indeks Profesionalitas ASN PD	Poin	76	72,92	95,95	14.200.000	12.450.000	87,68
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD (Dokumen)	Dokumen	1	1	100,00	14.200.000	12.450.000	87,68
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Dokumen	1	1	100,00	14.200.000	12.450.000	87,68
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja serta Evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan				Kategori AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori	A	A	100,00	8.969.853.518	8.625.089.915	96,16
	Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota			Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai	84,6	83,67	98,90	8.969.853.518	8.625.089.915	96,16

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dinas Kelautan dan Perikanan	Dokumen	12	12	100,00	60.176.000	56.854.614	94,48
			Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Dokumen	2	2	100,00	34.091.000	32.341.000	94,87
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	1.659.600	1.659.600	100,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	1.350.600	1.350.600	100,00
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	2.030.600	2.030.600	100,00



Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	1.680.600	1.680.600	100,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	100,00	2.193.000	2.193.000	100,00
			Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	Laporan	4	4	100,00	17.170.600	15.599.214	90,85
			Administrasi Keuangan PD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan	Dokumen	3	3	100,00	7.079.729.338	6.843.540.047	96,66
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	59	63	106,78	6.994.732.918	6.766.493.627	96,74

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100,00	81.914.500	73.964.500	90,29
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00	3.081.920	3.081.920	100,00
			Administrasi BMD pada PD	Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada PD yang disusun	Dokumen	3	3	100,00	18.456.000	12.527.885	67,88
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan BMD SKPD	Dokumen	1	1	100,00	17.086.000	11.182.720	65,45
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Laporan	2	2	100,00	1.370.000	1.345.165	98,19
			Administrasi Umum PD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Dokumen	7	7	100,00	347.440.650	341.355.572	98,25

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	203.255.650	200.986.632	98,88
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4	100,00	9.345.000	5.874.300	62,86
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	11.700.000	11.700.000	100,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	123.140.000	122.794.640	99,72
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda pada PD yang disusun	Dokumen	3	3	100,00	252.770.500	187.626.087	74,23
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	20.145.500	18.146.588	90,08

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	228.525.000	165.383.579	72,37
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	4.100.000	4.095.920	99,90
			Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Dokumen	3	3	100,00	1.211.281.030	1.183.185.710	97,68
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	70	44	62,86	390.673.500	370.029.578	94,72
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	12	12	100,00	820.607.530	813.156.132	99,09

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Produksi Usaha Sektor Perikanan			Laju Peningkatan Produksi Perikanan	%	2	-53,57	-2.678,50	5.350.372.689	5.161.822.439	96,48
PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			Laju Produksi Perikanan Tangkap	%	2,4	3,12	130,00	2.566.780.000	2.447.452.338	95,35
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap di perairan umum (unit)	Unit	24	24	100,00	150.570.000	148.555.130	98,66
		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	24	24	100,00	150.570.000	148.555.130	98,66
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah nelayan kecil yang terbina (Orang)	orang	600	502	83,67	2.243.985.000	2.135.233.991	95,15
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	500	502	100,40	2.237.525.000	2.132.681.771	95,31
		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit Usaha	50	35	70,00	6.460.000	2.552.220	39,51
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang operasional (unit)	Unit	4	4	100,00	157.135.000	149.251.847	94,98

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	3	3	100,00	157.135.000	149.251.847	94,98
			Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Dokumen Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) (Rekomendasi)	Rekomendasi	150	54	36,00	15.090.000	14.411.370	95,50
			Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Rekomendasi	150	54	36,00	15.090.000	14.411.370	95,50
			PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Laju Produksi Perikanan Budidaya	%	1,9	-56,69	-2.983,68	2.539.962.500	2.485.441.235	97,85
			Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi sertifikat Standar yang terbit	Rekomendasi	5	6	120,00	20.006.500	18.158.500	90,76



Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
			Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Rekomendasi	5	6	120,00	20.006.500	18.158.500	90,76
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil laki-laki dan perempuan yang memperoleh pemberdayaan (kelompok)	Kelompok	30	37	123,33	12.610.000	12.594.000	99,87

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
			Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	5	7	140,00	4.525.000	4.517.000	99,82
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Diklat	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	25	30	120,00	8.085.000	8.077.000	99,90
			Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	jumlah Sertifikat Standar bagi pembudidaya ikan Skala Kecil/ yang diterbitkan (Dokumen)	Dokumen	50	100	200,00	3.895.000	2.785.000	71,50

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
			Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekomendasi	50	100	200,00	3.895.000	2.785.000	71,50
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah sarana dan prasarana pembudidayaan ikan yang dimanfaatkan/ terbangun/ terehabilitasi	unit	76	174	228,95	2.503.451.000	2.451.903.735	97,94
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Dokumen	8	8	100,00	11.524.000	11.516.250	99,93
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	2	200,00	1.029.257.000	1.004.077.817	97,55

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	10	10	100,00	4.609.000	4.609.000	100,00
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	75	172	229,33	1.458.061.000	1.431.700.668	98,19
			PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Laju Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	2	- 8,508533267	-425,43	243.630.189	228.928.866	93,97
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha yang memiliki rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Unit Usaha)	Unit Usaha	10	15	150,00	19.485.000	18.798.660	96,48

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	8	8	100,00	19.485.000	18.798.660	96,48
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang memenuhi standar kelayakan pengolahan (unit usaha)	Unit Usaha	3	7	233,33	16.705.000	14.913.670	89,28



Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
			Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	6	7	116,67	16.705.000	14.913.670	89,28
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	kg/kapita/tahun	55	55	100,00	207.440.189	195.216.536	94,11
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	52161	52173	100,02	47.465.000	45.183.553	95,19

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	30	230	766,67	159.975.189	150.032.983	93,79
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan				Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring)	%	75	100	133,33	41.565.000	37.885.965	91,15
	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			Cakupan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang terawasi Berdasarkan Kewenangan Kabupaten	%	74	100	135,14	41.565.000	37.885.965	91,15
			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kab/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	74	74	100,00	41.565.000	37.885.965	91,15

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
			Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	20	20	100,00	22.420.000	20.608.635	91,92
			Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	30	30	100,00	2.570.000	2.508.635	97,61
			Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	24	24	100,00	16.575.000	14.768.695	89,10
TOTAL									14.375.991.207	13.837.248.319	96,25

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 merupakan laporan yang disusun untuk menyampaikan hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengacu pada target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-

2029, Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja baik dari sisi *output*, *outcome* maupun dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat serta untuk memberikan akuntabilitas dan transparansi kepada publik dan pemangku kepentingan.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah menunjukkan capaian yang bervariasi pada setiap sasaran strategis.

1. Pada sasaran *Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah*, indikator kinerja menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan nilai 100% pada Indeks Profesionalitas ASN dan nilai A pada AKIP Dinas. Hal ini mencerminkan bahwa tata kelola organisasi, akuntabilitas kinerja, serta kualitas sumber daya manusia telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah masih belum optimal dengan capaian sebesar 71,88%, sehingga perlu upaya peningkatan ke depan.
2. Pada sasaran *Meningkatnya Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan*, capaian kinerja menunjukkan hasil yang belum memenuhi target, dengan realisasi mengalami penurunan signifikan. Hal ini tercermin dari capaian yang sangat rendah (-2678,50%), yang mengindikasikan adanya faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi, seperti kondisi cuaca ekstrem, keterbatasan sarana produksi, serta fluktuasi hasil tangkapan dan budidaya.
3. pada sasaran *Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Peraturan Kelautan dan Perikanan*, capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 133,33%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha telah berjalan dengan sangat baik.

Secara agregat, capaian rata-rata kinerja menunjukkan angka yang tidak stabil akibat adanya deviasi yang sangat besar pada salah satu indikator, dengan capaian tertinggi sebesar

133,33% dan capaian terendah sebesar -2678,50%. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap indikator yang memiliki capaian ekstrem agar tidak mempengaruhi gambaran kinerja secara keseluruhan.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas program peningkatan produksi perikanan melalui dukungan sarana dan prasarana, teknologi, serta pendampingan kepada nelayan dan pembudidaya.
2. Mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dari sektor kelautan dan perikanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi.
3. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi kinerja agar lebih responsif terhadap dinamika di lapangan.
4. Meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan serta adaptasi terhadap perubahan iklim dan kondisi lingkungan.

Sebagai penutup, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja melalui perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. LKJIP ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi sekaligus dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan akuntabel di masa yang akan datang.

Demikian Kesimpulan dan Penutup LKJIP Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.



LAMPIRAN

SEMULIKELAH

Lampiran 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 57 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA**

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
 13. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 80 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
 14. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa;

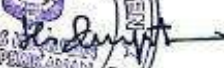
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja

yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa dan disampaikan kepada Bupati Sumbawa;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 05 Maret 2024

KEPALA DINAS,

RAHMAT HIDAYAT



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 57 TAHUN 2024
TANGGAL : 05 MARET 2024

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA

1. Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Tugas dan Kewajiban : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas kelautan dan perikanan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama Perubahan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	2 Meningkatnya produksi perikanan	3 Jumlah produksi perikanan	4 Ton	5 Produksi Perikanan ikan adalah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan.	6 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun N dijumlahkan dengan Produksi Perikanan Budidaya Tahun N	7 1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap 2. Kepala Bidang Perikanan Budidaya 3. Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan 4. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
2	Tercapainya target akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai (Huruf)	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai AKIP PD tahun n-1 publikasi APIP tahun n	Sekretaris Dinas





PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA.
- KESATU :** Menetapkan Indikator Kinerja Utama perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ini;
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja

yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;

- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa dan disampaikan kepada Bupati Sumbawa;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 24 Oktober 2025


KEPALA DINAS,

RAHMAT HIDAYAT

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 55 TAHUN 2025
TANGGAL : 24 Oktober 2025

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA

1. Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Tugas dan Kewajiban : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas kelautan dan perikanan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama Perubahan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pelayanan PD	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori 4	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat pemenuhan aspek profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam suatu Perangkat Daerah, yang mencakup kompetensi, kualifikasi, kinerja,	6 Tingkat IPASN: merupakan kategori IPASN yang menjadi ukuran kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN untuk penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN, dengan kriteria yaitu: 91-100 : Sangat Tinggi 81-90 : Tinggi 71-80 : Sedang 61-70 : Rendah	7 Sekretaris Dinas

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
				disiplin, dan etika profesi, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh instansi pembina kepegawaian.	< 60 : Sangat Rendah.	
		Kategori AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	POIN	AKIP merupakan mekanisme untuk menilai seberapa baik instansi pemerintah dalam pengelolaan kinerja: mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan hingga evaluasi dan pertanggungjawaban.	Kategori AKIP: Merupakan kategori kualitas AKIP yang menjadi gambaran implementasi akuntabilitas kinerja, dengan kategori yaitu: AA (> 90 - 100) : Sangat Memuaskan A (> 80 - 90) : Memuaskan BB (> 70 - 80) : Sangat Baik B (> 60 - 70) : Baik CC (> 50 - 60) : Cukup (Mamahi) C (> 40 - 50) : Kurang D (> 0 - 30) : Sangat Kurang Catatan: Kategori AKIP secara reguler diukur dan ditulis oleh Inspektur Daerah.	Sekretaris Dinas
		Proporsi retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah	%	Proporsi retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah adalah perbandingan antara total retribusi yang diperoleh dari kegiatan sektor kelautan dan perikanan dengan total retribusi daerah secara keseluruhan.	Rumus Perhitungan: $\text{Proporsi Retribusi Sektor Perikanan} = \frac{\text{Retribusi Sektor Perikanan}}{\text{Total Retribusi Daerah}} \times 100\%$	Sekretaris Dinas

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	Laju Peningkatan Produksi Perikanan	%	Laju produksi perikanan adalah tingkat pertumbuhan atau penurunan jumlah hasil produksi perikanan dari satu periode ke periode berikutnya (biasanya dari tahun ke tahun).	Laju Peningkatan Produksi Perikanan: secara umum mengukur seberapa cepat produksi sektor perikanan meningkat dalam kurun waktu tertentu. Rumus Perhitungan : $\text{Laju Peningkatan Produksi} = \left(\frac{\text{Produksi Tahun ke-n} - \text{Produksi Tahun ke-(n-1)}}{\text{Produksi Tahun ke-(n-1)}} \right) \times 100\%$	1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap 2. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran
3	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perikanan dan kelautan	Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring)	%	Persentase pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan hasil audit, pengawasan, atau monitoring resmi oleh instansi berwenang dalam periode waktu tertentu.	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh berdasarkan Hasil Monitoring dan pengawasan dibagi dengan Jumlah total pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diawasi/monitoring $\times 100\%$ $\text{Persentase Kepatuhan} = \left(\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang patuh}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang diawasi/monitoring}} \right) \times 100\%$	1. Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan



Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	681.153,00	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.275.489.269
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.136.583.500
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	42.160.000
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	215.318.000
2	Tercapainya Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.328.730.586

Sumbawa Besar, Januari 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa,



RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	Kategori	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.984.053.518,00
		Kategori AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Kategori)	Kategori		
		Proporsi retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah	%		
2	Meningkatnya Produksi Usaha Sektor Perikanan	Laju Peningkatan Produksi Perikanan (%)	%	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 2.566.780.000,00
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 2.539.962.500,00
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 243.630.189,00
3	Tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan	Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring) (%)	%	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 41.565.000,00

Sumbawa Besar,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa,

2025

BINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUMBAWA

Peminda ZK.1 (N/b)

NIP. 19730418 200003 1 004

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Sumbawa Besar 84314
Tlp (0371) 21144 Fax (0371) 2629087
Laman www.dislutkan.sumbawakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAT HIDAYAT, S.PI., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
SUMBAWA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MAHMUD ABDULLAH
Jabatan : BUPATI SUMBAWA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

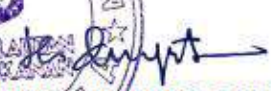
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumbawa Besar, Januari 2025

Pihak Kedua
BUPATI SUMBAWA

MAHMUD ABDULLAH

Pihak Pertama
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa,

RAHMAT HIDAYAT, S.PI., M.T.
NIP. 19730418 200003 1 004

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	681.153,00	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.275.489.269
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.136.583.500
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	42.160.000
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	215.318.000
2	Tercapainya Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.328.730.586

Sumbawa Besar, Januari 2025



RAHMAT HIDAYAT, S.Pi., MT.
Pembina TK (N/A)
Nip. 19730418 200003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Sumbawa Besar Tlp (0371)21144 Fax (0371)2629087
e-mail: dkp@sumbawakab.go.id website: www.dkp.sumbawakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAT HIDAYAT, S.PI. M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
SUMBAWA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. H. SYARAFUDDIN JAROT, MP
Jabatan : BUPATI SUMBAWA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumbawa Besar,

2025

Pihak Kedua
Bupati Sumbawa,



Pihak Pertama
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa,



RAHMAT HIDAYAT, S.PI. M.T.
NIP. 19730418 200003 1 004

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori) Kategori AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Kategori) Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perikanan (%)	Sedang A 2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.984.053.518,00
2	Meningkatnya Produksi Usaha Sektor Perikanan	Laju Peningkatan Produksi Perikanan (%)	2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 2.566.780.000,00 Rp 2.539.962.500,00 Rp 243.630.189,00
3	Tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan	Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit / monitoring) (%)	75	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 41.565.000,00

2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa,


RAHMAT HIDAYAT, S.Pi., M.T.
NIP.19730418 200003 1 004

Lampiran 4. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Sumbawa Besar
e-mail: dkp@sumbawakab.go.id website: www.dkp.sumbawakab.go.id

RENCANA AKSI KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa
Tahun : 2025

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RENCANA AKSI			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	Sedang	-	-	-	Sedang
		Kategori AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Kategori)	A	-	-	A	A
		Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perikanan (%)	2	0,4	0,5	0,7	0,4
2	Meningkatnya Produksi Usaha Sektor Perikanan	Laju Peningkatan Produksi Perikanan (%)	2	0,4	0,5	0,7	0,4
3	Tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan	Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil Audit/ monitoring) (%)	75	15	33,75	60	75

No	Program	Anggaran	RENCANA AKSI			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
			(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.897.243.518	2.549.210.554	5.141.867.724	6.791.828.515	8.897.243.518
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.566.780.000	52.587.000	960.629.035	1.695.299.202	2.566.780.000
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.631.562.500	418.242.500	927.020.000	1.650.962.000	2.631.562.500
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	87.905.000	11.645.000	23.985.000	34.090.000	87.905.000
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	242.490.189	48.600.000	99.578.000	161.218.000	242.490.189

Sumbawa Besar, 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa,


RAHMAT HIDAYAT, S.Pi., M.T.
NIP. 19730418 200003 1 004

Rencana Aksi Perubahan TA. 2025

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa
Tahun : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	RENCANA AKSI				PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	Rencana Aksi			
					TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	Ton	681.133,00	136.230,60	292.895,79	510.864,75	681.133,00	Program Pengelolaa Perikanan Tondol	2.275.489.269	52.587.000	960.639.036	1.695.299.202	2.275.489.269
									Program Pengelolaa Perikanan Budidaya	2.136.583.500	413.242.500	927.020.000	1.550.962.000	2.136.583.500
									Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	42.160.000	11.645.000	23.985.000	34.090.000	42.160.000
									Program Pengelolaa dan Pemasaran Hasil Perikanan	215.318.000	48.600.000	99.578.000	161.218.000	215.318.000
2	Tercapainya Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Huruf	(A)	-	-	(A)	(A)	Program Penunjaangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.328.730.586	2.549.210.554	5.141.867.714	6.751.328.515	8.328.730.586

Sumbawa Besar, Januari 2025

Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa

BUNY MELATI
KASUBDAN
NIP. 19730418 200003 1 004

Lampiran 5. Matriks Hasil Pengukuran Kinerja Tahunan

LAMPIRAN
Matriks Hasil Pengukuran Kinerja Tahunan Anggaran 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	Kategori	Sedang	Sedang	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.984.053.515,00	Rp 8.637.539.915,00	96,14
		Kategori AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Kategori)	Kategori	A	A	100				
		Proporsi retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah	%	0,32	0,23	71,875				
2	Meningkatnya Produksi Usaha Sektor Perikanan	Laju Peningkatan Produksi Perikanan (%)	%	2	-53,57	-2678,5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 2.566.780.000,00	Rp 2.447.452.338,00	95,35
							Program Pengelolaan Perikanan Budi daya	Rp 2.539.962.500,00	Rp 2.485.441.235,00	97,85
							Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 243.630.189,00	Rp 228.928.866,00	93,97
3	Tingkat Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan	Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring) (%)	%	75	100	133,33	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 41.565.000,00	Rp 37.885.965,00	91,15

Sumbawa, Januari 2026
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



RAHMAT HIDAYAT S.Pi MT
Pembina TK I/ IV/b
NIP. 19730418 200003 1 004

Lampiran 6. Rekapitulasi Capaian Rencana Aksi Tahun 2025

CAPAIAN RENCANA AKSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Target dan Realisasi Kinerja		Capaian (%)	Aktifitas Utama	Target	Target dan Realisasi Aktivitas		Capaian (%)	PROGRAM	ANGGARAN	Target dan Realisasi Anggaran		Capaian (%)
			Target TW IV	Realisasi TW IV				Target TW IV	Realisasi TW IV				Target TW IV	Realisasi TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	Sedang	Sedang	Sedang	100	Monitoring dan Evaluasi Tingkat Indeks Profesionalitas Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan	4 Laporan	1	1	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.984.033.318,00	Rp 8.984.033.318,00	Rp 8.637.539.915,00	96,14
	Kategori AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Kategori)	A	A	A	100	Evaluasi Program dan Kegiatan Peningkatan Produksi Perikanan Kab. Sumbawa	4 Laporan	1	1	100%					
	Proporsi retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah	%	0,32	0,23	71,88	Monitoring dan Evaluasi Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan	12 Laporan	12	12	100%					
Meningkatnya Produktif Usaha Sektor Perikanan	Laju Peningkatan Produksi Perikanan (%)	2	2	-53,57	-26,785	Evaluasi Program dan Kegiatan Peningkatan Produksi Perikanan Kab. Sumbawa	4 Laporan	1	1	100%	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 2.586.786.000,00	Rp 2.586.786.000,00	Rp 2.447.452.338,00	95,35
											Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 2.339.962.500,00	Rp 2.339.962.500,00	Rp 2.483.441.233,00	97,83
											Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 243.630.189,00	Rp 243.630.189,00	Rp 228.928.800,00	93,97
Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan	Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring)	75	75	100	1,33	Evaluasi Tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan	1 Laporan	1	1	100%	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 41.500.000,00	Rp 41.500.000,00	Rp 37.885.903,00	91,15



Lampiran 7. Realisasi Capaian Rencana Aksi Triwulan I - IV Tahun 2025

CAPAIAN RENCANA AKSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Target dan Realisasi Kinerja		Capaian (%)	Aktifitas Utama	Target	Target dan Realisasi Aktivitas		Capaian (%)	PROGRAM	ANGGARAN	Target dan Realisasi Anggaran		Capaian (%)
			Target TW I	Realisasi TW I				Target TW I	Realisasi TW I				Target TW I	Realisasi TW I	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	681.135	74.542,35	75.671,50	102%	Evaluasi Program dan Kegiatan Peningkatan Produksi Perikanan Kab. Sumbawa	4 Laporan	1	1	100%	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp2.275.489.269,00	Rp 455.097.854,00	Rp 15.750.000,00	3,46%
Tercapainya Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	A	-	-	100%	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	4 Laporan	1	1	100%	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 42.100.000,00	Rp 8.432.000,00	Rp 5.900.000,00	69,97%
Tercapainya Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	A	-	-	100%	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	4 Laporan	1	1	100%	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 215.318.000,00	Rp 43.063.600,00	Rp 14.750.000,00	34,25%
Tercapainya Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	A	-	-	100%	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	4 Laporan	1	1	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.328.730.586,00	Rp 2.082.182.647,00	Rp 1.960.997.221,00	94,18%



CAPAIAN RENCANA AKSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TRIWULAN II TAHUN 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Target dan Realisasi Kinerja		Capaian (%)	Aktivitas Utama	Target	Target dan Realisasi Aktivitas		Capaian (%)	PROGRAM	ANGGARAN	Target dan Realisasi Anggaran		Capaian (%)
			Target TW II	Realisasi TW II				Target TW II	Realisasi TW II				Target TW II	Realisasi TW II	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	681.135	155.703,09	155.232,99	100%	Evaluasi Program dan Kegiatan Peningkatan Produksi Perikanan Kab. Sumbawa	4 Laporan	1	1	100%	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp2.292.354.680,00	Rp 1.146.177.340,00	Rp 74.170.000,00	6,47%
Tercapainya Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	A	A	A	100%	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	4 Laporan	1	1	100%	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 37.620.000,00	Rp 18.810.000,00	Rp 9.400.000,00	49,97%
											Program Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp2.132.518.500,00	Rp 1.066.259.250,00	Rp 142.145.750,00	13,33%
											Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 210.690.189,00	Rp 105.345.095,00	Rp 81.636.250,00	77,49%
												Rp8.250.187.594,00	Rp4.125.093.797,00	Rp3.579.434.339,00	86,77%



CAPAIAN RENCANA AKSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TRIWULAN III TAHUN 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Target dan Realisasi Kinerja		Capaian (%)	Aktifitas Utama	Target	Target dan Realisasi Aktivitas		Capaian (%)	PROGRAM	ANGGARAN	Target dan Realisasi Anggaran		Capaian (%)
			Target TW III	Realisasi TW III				Target TW III	Realisasi TW III				Target TW III	Realisasi TW III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	681,135	510.864,75	250.365,98	0,49008271	Evaluasi Program dan Kegiatan Peningkatan Produksi Perikanan Kab. Sumbawa	4 Laporan	1	1	100%	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp2.322.322.680,00	Rp 1.741.472.000,00	Rp 1.545.418.968,00	88,74%
											Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp2.067.518.500,00	Rp 1.550.638.875,00	Rp 776.646.599,00	50,09%
											Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 37.620.000,00	Rp 28.215.000,00	Rp 18.969.040,00	67,23%
											Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 210.690.189,00	Rp 158.017.642,00	Rp 162.814.113,00	103,04%
Tercapainya Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	A	A	A	100%	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	4 Laporan	1	1	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.432.525.145,00	Rp 6.324.393.859,00	Rp 6.021.890.683,00	95,22%



CAPAIAN RENCANA AKSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Target dan Realisasi Kinerja		Capaian (%)	Aktifitas Utama	Target	Target dan Realisasi Aktivitas		Capaian (%)	PROGRAM	ANGGARAN	Target dan Realisasi Anggaran		Capaian (%)
			Target TW IV	Realisasi TW IV				Target TW IV	Realisasi TW IV				Target TW IV	Realisasi TW IV	
(1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	(2) Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	(3) Sedang	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	(13) Rp 8.984.053.518,00	(14)	(15)	(16)
			Sedang	Sedang	100	Monitoring dan Evaluasi Tingkat Indeks Profesionalitas Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan	4 Laporan	1	1	Rp 8.984.053.518,00			Rp 8.637.539.915,00	96,14	
			A	A	100	Evaluasi Program dan Kegiatan Peningkatan Produksi Perikanan Kab. Sumbawa	4 Laporan	1	1	100%					
	Proporsi retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah	%	0,32	0,23	71,88	Monitoring dan Evaluasi Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan	12 Laporan	12	12	100%					
			2	2	-53,57	-26,785	Evaluasi Program dan Kegiatan Peningkatan Produksi Perikanan Kab. Sumbawa	4 Laporan	1	1	100%	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 2.566.780.000,00	Rp 2.447.452.338,00	95,35
												Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 2.539.962.500,00	Rp 2.485.441.235,00	97,85
											Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 243.630.189,00	Rp 243.630.189,00	Rp 228.928.866,00	93,97
(17) Tingkat kepatuhan usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring) (%)	Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring) (%)	75	75	100	1,333333333	Evaluasi Tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan	1 Laporan	1	1	100%	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 41.565.000,00	Rp 41.565.000,00	Rp 37.885.965,00	91,15

Januari 2026
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

RAHMAT HIBWAT S.P.I MT
Pembina Tek. IV/b
ENIP 19720418 200003 1 004

Lampiran 8. Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

LAMPIRAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	3 Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori) Kategori AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Kategori) Proporsi retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah	4 Kategori Kategori %	5 Sedang A 0,32	6 Sedang A 0,23	7 100 100 71,88	8 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	9 Rp 8.584.053.518,00	10 Rp 8.637.539.915,00	11 11 96,14
2	Meningkatnya Produksi Usaha Sektor Perikanan	Laju Peningkatan Produksi Perikanan (%)	%	2	-53,57	-2678,5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 2.566.780.000,00 Rp 2.539.062.500,00 Rp 243.630.189,00	Rp 2.447.452.338,00 Rp 2.485.441.235,00 Rp 228.928.866,00	95,35 97,85 93,97
3	Tingkat Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan	Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring) (%)	%	75	100	133,33	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 41.565.000,00	Rp 37.885.965,00	91,15

Januari 2026
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
HIDAYAT S.P. MT
Pembina IV/b
MP.1973008 200003 1 004

Lampiran 9. Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Triwulan I – IV Tahun 2025

CAPAIAN PERJANJIAN KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	Ton	681.135,00	75.671,50	11,11%	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 2.275.489.269,00	Rp 15.750.000,00	0,69%
							Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 2.136.583.500,00	Rp 20.650.000,00	0,97%
							Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 42.160.000,00	Rp 5.900.000,00	13,99%
							Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 215.318.000,00	Rp 14.750.000,00	6,85%
2	Tercapainya Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai	A	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.328.730.586,00	Rp 1.960.997.221,00	23,54%



CAPAIAN PERENCANAAN KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TRIMULAN II TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	Ton	681.135,00	155.232,99	22,79%	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 2.292.354.680,00	Rp 74.170.000,00	3,24%
							Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 2.132.518.500,00	Rp 142.145.750,00	6,67%
							Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 37.620.000,00	Rp 9.400.000,00	24,99%
							Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 210.690.189,00	Rp 81.636.250,00	38,75%
2	Tercapainya Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai	A	A	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.250.187.594,00	Rp 3.579.434.339,00	43,39%



CAPAIAN PERJANJIAN KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TRIWULAN III TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	Ton	681.135,00	250.365,98	36,76%	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 2.322.322.680,00	Rp 1.545.418.968,00	66,55%
							Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 2.067.518.500,00	Rp 776.646.599,00	37,56%
							Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 37.620.000,00	Rp 18.969.040,00	50,42%
							Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 210.690.189,00	Rp 162.814.113,00	77,28%
2	Tercapainya Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai	A	A	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.432.525.145,00	Rp 6.021.890.683,00	71,41%



CAPAIAN PERJANJIAN KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TRIMULAN IV TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN (Kategori)	Kategori	Sedang	Sedang	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.984.053.518,00	Rp 8.637.539.915,00	96,14
		Kategori AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Kategori)	Kategori	A	A	100				
		Proporsi retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah	%	0,32	0,23	71,88				
2	Meningkatnya Produkasi Usaha Sektor Perikanan	Laju Peningkatan Produksi Perikanan (%)	%	2	53,57	-2578,50	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 2.566.780.000,00	Rp 2.447.452.338,00	95,35
							Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 2.530.962.500,00	Rp 2.485.441.235,00	97,85
							Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 243.630.189,00	Rp 228.928.866,00	93,97
3	Tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan	Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring) (%)	%	75	100	133,33	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 41.565.000,00	Rp 37.885.965,00	91,15

Januari 2026
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Pembina SK I W/b
NIP.19730618 200003 1 004

CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUMBAWA TAHUN 2025 (BERDASARKAN RENSTRA 2021-2026)																	
Tujuan PD	Sasaran PD	Program PD	Kegiatan	Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Target Kinerja Renja	Pagu Indikatif Benja (Rp)	Target Kinerja DPPA	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi
X.XX.01	Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan dengan Peningkatan Kualitas Tercapainya target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kab/Kota	Meningkatnya Nilai AMP PD	Nilai Reformasi Birokrasi Kategori Nilai AMP PD	Nilai AMP PD	Kategori Nilai AMP PD	A	11.143.450.003,00	A	7.287.382.582,00	A	8.984.053.518,00	A	8.037.539.915,00	100,00	90,14
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun	Dokumen	12	159.959.628,00	12	97.322.750,00	12	60.176.000,00	12	58.854.614,00	100,00	94,48
X.XX.01.2.0	Perencanaan PD	X.XX.01.2.0	Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Dokumen	2	93.303.353,00	2	83.341.000,00	2	34.091.000,00	2	32.341.000,00	100,00	94,87
X.XX.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	X.XX.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6.537.872,00	1	1.999.730,00	1	1.039.600,00	1	1.039.600,00	100,00	100,00
X.XX.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	X.XX.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4.387.957,00	1	2.031.000,00	1	1.330.600,00	1	1.330.600,00	100,00	100,00
X.XX.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	X.XX.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4.387.957,00	1	2.381.000,00	1	2.030.000,00	1	2.030.000,00	100,00	100,00
X.XX.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	X.XX.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4.387.957,00	1	2.686.000,00	1	1.680.000,00	1	1.680.000,00	100,00	100,00
X.XX.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	X.XX.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	5.961.870,00	2	3.350.000,00	2	2.193.000,00	2	2.193.000,00	100,00	100,00
X.XX.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	X.XX.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	33.823.865,00	4	2.374.000,00	4	17.170.000,00	4	13.399.214,00	100,00	90,83
X.XX.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	X.XX.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen R												

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif Kinerja (Rp)	Target Kinerja DPPA	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi
		X.XX.01.2.05	Administrasi BMD pada PD		Terlaksananya Administrasi BMD pada PD	Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada PD yang disusun	Dokumen	3	6.300.076,00	3	18.450.000,00	3	12.527.885,00	100,00	67,68
			X.XX.01.2.05.3.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan BMD SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan BMD SKPD	Dokumen	1	3.171.440,00	1	17.086.000,00	1	11.182.720,00	100,00	65,43
			X.XX.01.2.05.3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Laporan	2	3.189.230,00	2	1.370.000,00	2	1.343.105,00	100,00	98,19
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian PD		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD yang disusun	Dokumen	1	23.899.085,00	1	14.200.000,00	1	12.450.000,00	100,00	87,68
			X.XX.01.2.05.3.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	23.899.085,00	1	14.200.000,00	1	12.450.000,00	100,00	87,68
		X.XX.01.2.05	Administrasi Umum PD		Terlaksananya Administrasi Umum PD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD yang disusun	Dokumen	7	312.488.022,00	7	347.440.050,00	7	341.355.572,00	100,00	98,25
			X.XX.01.2.05.6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	1	82.376.532,00	1	203.253.030,00	1	200.989.032,00	100,00	98,88
			X.XX.01.2.05.6.0000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4	20.489.606,00	4	9.345.000,00	4	5.874.300,00	100,00	62,86
			X.XX.01.2.05.6.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	34.217.348,00	1	11.700.000,00	1	11.700.000,00	100,00	100,00
			X.XX.01.2.05.6.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	109.204.456,00	1	123.140.000,00	1	122.794.640,00	100,00	99,72
		X.XX.01.2.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda pada PD yang disusun	Dokumen	3	201.376.349,00	3	252.770.500,00	3	187.026.087,00	100,00	74,23
			X.XX.01.2.05.8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	33.129.715,00	1	20.143.300,00	1	18.140.588,00	100,00	90,08
			X.XX.01.2.05.8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	228.216.334,00	1	228.213.000,00	1	105.383.579,00	100,00	72,37
			X.XX.01.2.05.8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	4.447.500,00	1	4.100.000,00	1	4.093.520,00	100,00	99,50
		X.XX.01.2.05	Peneliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Peneliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Peneliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda pada PD yang disusun	Dokumen	82	651.926.808,00	82	1.211.281.030,00	3	1.183.185.710,00	100,00	97,68
			X.XX.01.2.05.9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	70	328.984.314,00	70	390.073.500,00	44	370.023.578,00	62,86	94,72

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan Rekomendasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Rencstra (Rp)	Target Kinerja DPPA	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi
		3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Perikanan (izin Usaha Perikanan dan Pengembangan Perikanan)	Terlaksananya Penerimaan Izin Usaha Perikanan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan Rekomendasi Teknis	Jumlah Rekomendasi Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan Rekomendasi Teknis	Rekomendasi	10	41.771.039,00	3	20.000.000,00	0	18.158.000,00	120,00	90,76
		3.25.04.2.03	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya pembudidaya ikan kecil laki-laki dan perempuan yang diberdayakan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil laki-laki dan perempuan yang memperoleh pemberdayaan (kelompok)	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil laki-laki dan perempuan yang memperoleh pemberdayaan (kelompok)	Kelompok	40	135.828.895,00	30	12.010.000,00	37	12.594.000,00	123,33	99,87
		3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelompok	Jumlah kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelompok	Kelompok	3	59.832.826,00	3	4.323.000,00	7	4.317.000,00	140,00	99,82
		3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Diklat	Terlaksananya pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Diklat	Jumlah kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Diklat	Jumlah kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Diklat	Kelompok	35	75.990.069,00	25	8.085.000,00	30	8.077.000,00	120,00	99,90
		3.25.04.2.03	Penerimaan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Terlaksananya penerimaan Surat Keterangan Tanda Daftar bagi pembudidaya ikan	Jumlah dokumen Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) yang diterbitkan (dokumen)	Jumlah dokumen Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) yang diterbitkan (dokumen)	Dokumen	200	18.598.985,00	50	3.895.000,00	100	2.785.000,00	200,00	71,50
		3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Perikanan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah kab/kota	Terlaksananya Penerimaan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kab/Kota	Rekomendasi	200	18.598.985,00	50	3.895.000,00	100	2.785.000,00	200,00	71,30
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah	Jumlah sarana dan prasarana pembudidayaan ikan yang dimanfaatkan/ terbangun/ terhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana pembudidayaan ikan yang dimanfaatkan/ terbangun/ terhabilitasi	unit	205	6.534.242.942,00	70	2.503.451.000,00	174	2.451.903.735,00	228,95	97,94
		3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kab/kota	Terlaksananya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Dokumen	8	40.897.419,00	8	11.524.000,00	8	11.516.250,00	100,00	99,93
		3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kab/kota	Terlaksananya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kab/kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kab/kota	Unit	3	1.332.010.177,00	1	1.039.257.000,00	2	1.004.077.817,00	200,00	97,55

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikator Kinerja (Rp)	Target Kinerja DPPA	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi
			3.25.04.2.0 4.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	Terjaminnya ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	Unit	200	4.892.026.822,00	75	1.438.001.000,00	172	1.431.700.008,00	229,33	98,19
			3.25.04.2.0 4.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota yang Terjadi Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Terseadainya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota yang Terjadi Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota yang Terjadi Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	10	202.078.524,00	10	4.009.000,00	10	4.009.000,00	100,00	100,00
			3.25.05	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya lokasi perairan umum yang terjaga kelestarian sumber daya ikan	Cakupan perairan umum yang terjaga kelestarian sumberdaya ikan	%	09,44	185.010.945,00	75	41.565.000,00	75	37.885.965,00	100,00	91,15
			3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/kota	Terseadainya sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/kota (dokumen)	Dokumen	10	185.010.945,00	10	41.565.000,00	10	37.885.965,00	100,00	91,15
			3.25.05.2.0 1.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Terseadainya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	3	89.101.440,00	20	21.420.000,00	20	20.008.635,00	100,00	91,92
			3.25.05.2.0 1.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha		7.115.000,00	30	2.370.000,00	30	2.308.635,00	100,00	97,61
			3.25.05.2.0 1.0007	Pengawasan usaha pengangkutan ikan dan/atau usaha pengolahan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Usaha Pengangkutan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha pengangkutan ikan dan/atau usaha pengolahan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	3	95.909.505,00	24	10.375.000,00	24	14.798.695,00	100,00	85,10
			3.25.06	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi dan hasil perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Ton	10494	1.005.287.939,00	10494	243.630.189,00	11097	228.328.860,00	105,75	93,97
			3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya penerbitan dokumen Nomor induk Berusaha (NIB) Pengolahan Hasil Perikanan yang terbit	Jumlah Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Pengolahan Hasil Perikanan yang terbit (dokumen)	Dokumen	10	80.831.091,00	10	19.485.000,00	15	18.798.000,00	150,00	96,48
			3.25.06.2.0 1.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	Terseadainya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	8	80.831.091,00	8	19.485.000,00	8	18.798.000,00	100,00	96,48

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Target Kinerja Renja	Pagu Indikatif Renja (Rp)	Target Kinerja DPPA	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Terlaksananya pembinaan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang memenuhi standar Kelayakan pengolahan (unit usaha)	Unit Usaha	3	66.913.211,00	3	21.675.000,00	3	16.705.000,00	7	14.913.670,00	233,33	89,28
			3.25.06.2.02.2.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	6	66.913.211,00	6	21.675.000,00	6	16.705.000,00	7	14.913.670,00	116,67	89,28
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Produk Perikanan		Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	kg/kapita/tahun	55	852.214.000,00	55	852.214.000,00	55	207.440.189,00	55	195.216.530,00	100,00	94,11
			3.25.06.2.03.2.0001	Penggiatan kewirausahaan dan pemasaran produk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Berlaksananya kegiatan kewirausahaan dan pemasaran produk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Pengolahan dan Pemasaran Produk Usaha Konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Ton	32161	018.090.218,00	32161	13.470.000,00	32161	47.465.000,00	32178	45.183.533,00	100,02	93,19
			3.25.06.2.03.2.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	30	239.447.419,00	30	836.744.000,00	30	159.973.189,00	230	150.032.963,00	706,67	93,79

CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB SUMBAWA TAHUN 2025 (BERDASARKAN RENSTRA 2025-2029)																		
Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Renstra	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Target Kinerja Renja	Pagu Indikatif Renja (Rp)	Target Kinerja DPPA	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	PK/ SKP
Terwujudnya Peningkatan Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Mendukung Industri/agroindustri																		
Meningkatnya kompetensi, kinerja dan disiplin ASN PD																		
	X.XX.01	Peningkatan Urusan Pemda kab/kota			Meningkatnya Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin ASN PD	Kategori Trinitas Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori	Sedang	13.000.000	76,00	13.000.000	Sedang	14.200.000	72,92	12.450.000,00	95,95	87,68	Sekretaris Dinas
	X.XX.01.2.01	Administrasi Kepegawaian Daerah			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD (Dokumen)	Dokumen	1	13.000.000	1	13.000.000	1	14.200.000	1	12.450.000,00	100,00	87,68	
		X.XX.01.2.05.0003			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Dokumen	1	13.000.000,00	1	13.000.000,00	1	14.200.000,00	1	12.450.000,00	100,00	87,68	
Terwujudnya Peningkatan Produk Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Mendukung Industri/agroindustri																		
					Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Angka)	Angka	3,417	8.278.410.545	3,417	8.278.410.545			8.909.853.518		8.025.089.915,00	0,00	96,16	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja serta Evaluasi kinerja																		
	X.XX.01	Peningkatan Urusan Pemda kab/kota			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori AKRP Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori	A	8.278.410.545	A	8.278.410.545	A	8.909.853.518	A	8.025.089.915,00	100,00	96,16	
					Nilai AKRP Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai		84,60	8.278.410.545	84,60	8.278.410.545	83,67	8.909.853.518	83,67	8.025.089.915,00	98,90	96,16	Sekretaris Dinas
Terwujudnya Peningkatan Produk Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Mendukung Industri/agroindustri																		
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dinas Kelautan dan Perikanan	Dokumen	12	57.076.000	12	57.076.000	12	60.176.000,00	12	56.854.014,00	100,00	94,48	Sekretaris Dinas
		X.XX.01.2.01.0001			Tersusunnya Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Dokumen	2	32.891.000,00	2	32.891.000,00	2	34.091.000,00	2	32.341.000,00	100,00	94,87	Sekretaris Dinas
		X.XX.01.2.01.0002			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.059.600,00	1	1.059.600,00	1	1.059.600,00	1	1.059.600,00	100,00	100,00	Sekretaris Dinas
		X.XX.01.2.01.0003			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.350.000,00	1	1.350.000,00	1	1.350.000,00	1	1.350.000,00	100,00	100,00	Sekretaris Dinas
		X.XX.01.2.01.0004			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.030.000,00	1	2.030.000,00	1	2.030.000,00	1	2.030.000,00	100,00	100,00	Sekretaris Dinas
		X.XX.01.2.01.0005			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1.680.000,00	1	1.680.000,00	1	1.680.000,00	1	1.680.000,00	100,00	100,00	Sekretaris Dinas

Tujuan Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Renstra	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Target Kinerja Renja	Pagu Indikatif Renja (Rp)	Target Kinerja DPPA	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	PK/ SKP
		X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2.193.000,00	2	2.193.000,00	2	2.193.000,00	2	2.193.000,00	100,00	100,00	Sekretaris Dinas
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja PD	Tersedianya Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	Laporan	4	13.270.000,00	4	13.270.000,00	4	17.170.000,00	4	13.399.214,00	100,00	90,83	Sekretaris Dinas
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan PD		Tersedianya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan	Dokumen	25	6.919.048.015,00	25	6.919.048.015,00	3	7.079.729.338,00	3	6.843.540.047,00	100,00	90,60	Sekretaris Dinas
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	38	8.834.051.295,00	38	8.834.051.295,00	39	8.994.732.918,00	63	8.766.493.027,00	100,78	90,74	Sekretaris Dinas
		X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	81.914.300,00	12	81.914.300,00	12	81.914.300,00	12	73.964.300,00	100,00	90,29	Sekretaris Dinas
		X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.081.920,00	1	3.081.920,00	1	3.081.920,00	1	3.081.920,00	100,00	100,00	Sekretaris Dinas
	X.XX.01.2.03	Administrasi BMD pada PD		Meningkatnya kualitas manajemen penatausahaan BMD Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada PD yang disusun	Dokumen	3	18.456.000,00	3	18.456.000,00	3	18.456.000,00	3	12.527.885,00	100,00	67,88	Sekretaris Dinas
		X.XX.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan BMD SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan BMD SKPD	Dokumen	1	17.086.000,00	1	17.086.000,00	1	17.086.000,00	1	11.182.720,00	100,00	65,43	Sekretaris Dinas
		X.XX.01.2.03.0003	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Tersedianya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Laporan	2	1.370.000,00	2	1.370.000,00	2	1.370.000,00	2	1.343.103,00	100,00	98,19	Sekretaris Dinas
	X.XX.01.2.04	Administrasi Umum PD		Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Dokumen	7	116.907.960,00	7	116.907.960,00	7	347.446.650,00	7	341.355.572,00	100,00	98,25	Sekretaris Dinas
		X.XX.01.2.04.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	94.437.500,00	1	94.437.500,00	1	203.235.630,00	1	200.986.032,00	100,00	98,88	Sekretaris Dinas
		X.XX.01.2.04.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4	9.345.000,00	4	9.345.000,00	4	9.345.000,00	4	5.874.300,00	100,00	62,86	Sekretaris Dinas
		X.XX.01.2.04.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	11.700.000,00	1	11.700.000,00	1	11.700.000,00	1	11.700.000,00	100,00	100,00	Sekretaris Dinas
		X.XX.01.2.04.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.425.400,00	1	1.425.400,00	1	123.140.000,00	1	122.794.040,00	100,00	99,72	Sekretaris Dinas
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda pada PD yang disusun	Dokumen	3	195.570.500,00	3	195.570.500,00	3	252.770.500,00	3	187.826.087,00	100,00	74,23	Sekretaris Dinas

Tujuan Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Renstra	Pagu Indikator Renstra (Rp)	Target Kinerja Renja	Pagu Indikator Renja (Rp)	Target Kinerja DPPA	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	PK/ SKP
		X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	18.943.300,00	1	18.943.300,00	1	20.143.300,00	1	18.146.388,00	100,00	90,08	Sekretaris Dinas
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	172.323.000,00	1	172.323.000,00	1	228.323.000,00	1	103.383.379,00	100,00	72,37	Sekretaris Dinas
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	4.100.000,00	1	4.100.000,00	1	4.100.000,00	1	4.095.320,00	100,00	99,90	Sekretaris Dinas
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Dokumen	56	971.352.130,00	56	971.352.130,00	3	1.211.281.030,00	3	1.183.185.710,00	100,00	97,08	Sekretaris Dinas
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/ Direhabilitasi	Unit	44	345.736.050,00	44	345.736.050,00	70	390.873.500,00	44	370.029.378,00	82,86	94,72	Sekretaris Dinas
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/ Direhabilitasi	Unit	12	825.010.080,00	12	825.010.080,00	12	820.807.330,00	12	813.126.132,00	100,00	99,09	Sekretaris Dinas
Terwujudnya Peningkatan Produktif Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Mendukung Industri/Agribisnis Sektor Kelautan dan Perikanan																	
		3.25.03	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produktif Perikanan Tangkap	Laju Peningkatan Produktif Perikanan	Poin	1,29	4.038.151.309	1,29	4.038.151.309		5.391.937.089		5.198.708.404,00	0,00	96,43	
		3.25.03.2.01	Penyelenggaraan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungei, Danau, Waduk, Rawan, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap di perairan umum	Laju Produksi Perikanan Tangkap	%	2	4.389.841.180,00	2	4.389.841.180,00	2	5.100.742.500,00	-53,57	4.932.893.573,00	-2.676,50	96,60	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
		3.25.03.2.02	Pengembangan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Nelayan kecil yang terbina (Orang)	Jumlah sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap di perairan umum (unit)	Unit	24	150.570.000,00	24	150.570.000,00	24	150.570.000,00	24	148.555.130,00	100,00	98,60	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
		3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Terlaksananya Nelayan kecil yang terbina (Orang)	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terbina dan Tersedia	Unit	24	150.570.000,00	24	150.570.000,00	24	150.570.000,00	24	148.555.130,00			Kepala Bidang Perikanan Tangkap
		3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pembiayaan, Bantuan Pembiayaan, Kredit Pembiayaan	Terlaksananya Nelayan kecil yang terbina (Orang)	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	500	1.999.527.080,00	500	1.999.527.080,00	000	2.243.985.000,00	502	2.135.233.991,00	83,67	95,15	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
		3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pembiayaan, Bantuan Pembiayaan, Kredit Pembiayaan	Terlaksananya Nelayan kecil yang terbina (Orang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit Usaha	500	1.993.007.680,00	500	1.993.007.680,00	500	2.237.323.000,00	502	2.132.681.771,00	100,40	95,31	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
		3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah TPI yang operasional (unit)	Unit	0	157.135.000,00	0	157.135.000,00	4	157.135.000,00	4	149.351.847,00	100,00	94,98	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
		3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	2	157.135.000,00	2	157.135.000,00	3	157.135.000,00	3	149.351.847,00	100,00	94,98	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
		3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berskala sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungei, Danau, Waduk, Rawan, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat	Terlaksananya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDRP)	Dokumen Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDRP)	Rekomendasi	150	15.090.000,00	150	15.090.000,00	150	15.090.000,00	154	14.411.370,00	36,00	95,50	Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Tujuan Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tarset Kinerja Renstra	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Tarset Kinerja Renja	Pagu Indikatif Renja (Rp)	Tarset Kinerja DPPA	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Realisasi (%)	PK/ SKP
		3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Rekomendas i	120	13.090.000,00	120	13.090.000,00	130	13.090.000,00	54	14.411.370,00	36,00	95,30	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
3.25.04	PENGLOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Laju Produksi Perikanan Budidaya	%	1,9	2.007.518.500,00	1,9	2.007.518.500,00	1,9	2.539.992.500,00	-56,09	2.485.441.235,00	-2.983,68	97,85	Kepala Bidang Perikanan Budidaya
		3.25.04.2.03	Penerbitan izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Ushanya dalam 1 (satu) Daerah Kab/kota	terlaksananya penerbitan sertifikat standar	Jumlah Rekomendasi sertifikat Standar yang terbit	Rekomendas i	5	18.800.500,00	5	18.800.500,00	5	20.000.500,00	6	18.158.500,00	120,00	90,70	Kepala Bidang Perikanan Budidaya
		3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Ushanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kab/kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Terbitnya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Ushanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kab/kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Ushanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kab/kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Rekomendas i	3	18.800.500,00	3	18.800.500,00	3	20.000.500,00	6	18.138.500,00	120,00	90,76	Kepala Bidang Perikanan Budidaya
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			Terlaksananya Fasilitas Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan kecil	Jumlah kelompok pembudidayaan ikan kecil laki-laki dan perempuan yang memperoleh pemberdayaan (kelompok)	Kelompok	30	12.585.000,00	30	12.585.000,00	30	12.610.000,00	37	12.594.000,00	123,33	99,87	Kepala Bidang Perikanan Budidaya
		3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kembangkan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kembangkan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudi Daya Ikan kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kembangkan	Kelompok	3	3.700.000,00	3	3.700.000,00	3	4.325.000,00	7	4.317.000,00	140,00	99,82	Kepala Bidang Perikanan Budidaya
		3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, kemudhan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pelatihan	Terperuhnya Pendampingan, kemudhan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pelatihan	Jumlah kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, kemudhan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pelatihan	Kelompok	25	8.885.000,00	25	8.885.000,00	25	8.885.000,00	30	8.077.000,00	120,00	99,30	Kepala Bidang Perikanan Budidaya
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kab/kota			Terbitnya sertifikasi Standar bagi pembudidayaan ikan kecil	Jumlah sertifikasi Standar bagi pembudidayaan ikan kecil	Dokumen	50	3.895.000,00	50	3.895.000,00	50	3.895.000,00	100	2.785.000,00	200,00	71,50	Kepala Bidang Perikanan Budidaya
		3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kab/kota	Terbitnya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Budidaya bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Budidaya bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekomendas i	30	3.895.000,00	30	3.895.000,00	30	3.895.000,00	100	2.785.000,00	200,00	71,30	Kepala Bidang Perikanan Budidaya
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			Terlaksananya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/kota	Jumlah sarana dan prasarana pembudidayaan ikan yang dimanfaatkan/ terbangun/ terhabilitasi	unit	70	2.032.232.000,00	70	2.032.232.000,00	70	2.503.451.000,00	174	2.451.903.735,00	228,95	97,94	Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Renstra	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Target Kinerja Renja	Pagu Indikatif Renja (Rp)	Target Kinerja DPPA	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	PK/ SKP
			3.25.04.2.04.0003	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Dokumen	8	11.524.000,00	8	11.524.000,00	8	11.524.000,00	8	11.516.250,00	100,00	99,33	
			3.25.04.2.04.0002	Pemeliharaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	1.004.437.000,00	1	1.004.437.000,00	1	1.029.227.000,00	2	1.004.077.817,00	200,00	97,25	
			3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	10	4.609.000,00	10	4.609.000,00	10	4.609.000,00	10	4.609.000,00	100,00	100,00	
			3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	75	901.642.000,00	75	901.642.000,00	75	1.458.001.000,00	172	1.431.700.008,00	229,33	98,19	
			Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan															
			3.25.05	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya lokasi persairan umum yang terjaga kelestarian sumber dayanya	Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring)	%	75	248.310.189,00	75	248.310.189,00	75	265.195.189,00	100	240.814.831,00	133,33	93,56	
			3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kab/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Pelaku usaha perikanan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang terawasi berdasarkan kewenangan kabupaten/kota	%	74	37.020.000,00	74	37.020.000,00	74	41.595.000,00	100	37.885.905,00	135,14	91,15	Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan
			3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Terawastinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	20	19.673.000,00	20	19.673.000,00	20	22.420.000,00	20	20.608.033,00	100,00	91,92	Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan
			3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	30	2.570.000,00	30	2.570.000,00	30	2.570.000,00	30	2.508.033,00	100,00	97,61	Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan
			3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Usaha Penguasaan ikan dan/atau Usaha Pengangkutan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	24	13.375.000,00	24	13.375.000,00	24	16.375.000,00	24	14.768.095,00	100,00	89,10	Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan
			3.25.06	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Laju Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	2	210.090.189,00	2	210.090.189,00	2	243.030.189,00	-8,51	228.928.860,00	-425,43	93,97	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Renstra	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Target Kinerja Renja	Pagu Indikatif Renja (Rp)	Target Kinerja DPPA	Anggaran DPPA (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	PK/ SKP
		3.25.06.2.03	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Terlaksananya penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha yang memiliki rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan (Unit Usaha)	Unit Usaha	10	19.485.000,00	10	19.485.000,00	15	19.485.000,00	15	18.798.600,00	150,00	96,48	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			3.25.06.2.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Risiko		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	8	19.485.000,00	8	19.485.000,00	8	19.485.000,00	8	18.798.600,00	100,00	96,48	
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Terlaksananya penerbitan dokumen Nomor induk Berusaha (NIB) Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang memenuhi standar kelayakan pengolahan (unit usaha)	Unit Usaha	5	15.505.000,00	5	15.505.000,00	7	10.705.000,00	7	14.913.670,00	233,33	89,28	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	3	13.303.000,00	3	13.303.000,00	7	10.705.000,00	7	14.913.670,00	116,67	89,28	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/kota		Meningkatnya Angka konsumsi ikan	Jumlah angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	kg/kapita/tahun	55	175.700.189,00	55	175.700.189,00	55	207.440.189,00	55	195.216.536,00	100,00	94,11	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			3.25.06.2.03.0001	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/kota		Jumlah Peningkatan Ketersediaan ikan untuk konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	52161	13.725.000,00	52161	13.725.000,00	52173	47.403.000,00	52173	45.183.353,00	100,02	93,19	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/kota		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terdaftar	Pelaku Usaha	2	159.973.189,00	2	159.973.189,00	230	159.973.189,00	230	130.032.983,00	706,07	93,79	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Lampiran 11. Perjanjian dan Pengukuran Kinerja Pejabat Struktural tahun 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Sumbawa Besar
Tlp (0371)21144 Fax (0371)2629087
Laman: www.dkp.sumbawakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURHIKMAH S.Pt., M.AP
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAHMAT HIDAYAT, S.Pi., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa,



RAHMAT HIDAYAT, S.Pi., M.T.
NIP. 19730418 200003 1 004

Sumbawa Besar, Januari 2025

Pihak Pertama

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa,



NURHIKMAH S.Pt., M.AP
NIP. 19710727 199703 1 004

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
SEKRETARIAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tercapainya Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Sumbawa	84,60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.328.720.586

Sumbawa Besar, Januari 2025
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Sumbawa


NURHIKMAH S.Pt., M.AP
NIP. 19710727 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Sumbawa Besar
e-mail: dislutkan@sumbawakab.go.id website: www.dkp.sumbawakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURHIKMAH S.PT, M.AP
: SEKRETARIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
SUMBAWA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAHMAT HIDAYAT, S.PI., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumbawa Besar, 2025

Pihak Pertama
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa,



NURHIKMAH S.PT, M.AP
NIP. 19710727 199703 1 004

Pihak Kedua

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa,



RAHMAT HIDAYAT, S.PI., M.T.
NIP. 19730418 200003 1 004

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
SEKRETARIAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pelayanan PD	Indeks Profesionalitas ASN PD (Poin)	76,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 8.897.243.518
		Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Poin)	84,60		
		Laju Realisasi Retribusi Daerah Sektor Perikanan (%)	2		

Sumbawa Besar, 2025
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Sumbawa


NURHIKMAH S.P.T. M.AP
NIP. 19710727 199703 1 004

LAMPIRAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
SEKRETARIAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pelayanan PD	Indeks Profesionalitas ASN PD (Poin)	76	72,92	95,95	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.984.053.518,00	Rp 8.637.539.915,00	96,14
		Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Poin)	84,6	83,67	98,90				
		Laju Realisasi Retribusi Daerah Sektor Perikanan (%)	2	-13,18	-659,00				

Sumbawa Besar, Januari 2026
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa,



NURHIKMAH S.Pt. M.AP
NIP. 19711127 199703 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Sumbawa Besar 84314

Tlp (0371) 21144 Fax (0371) 2629087

Laman www.diskutikan.sumbawakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BURHANUDDIN, S.PI

Jabatan : KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAHMAT HIDAYAT, S.PI., M.T.

Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
SUMBAWA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumbawa Besar, Januari 2025

Pihak Pertama

Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Pihak Kedua
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa,

RAHMAT HIDAYAT, S.PI., M.T.
NIP. 19730418 200003 1 004


BURHANUDDIN, S.PI
NIP. 19691008 199703 1 006

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	71.153

Sumbawa Besar, Januari 2025
Kepala Bidang Perikanan Tangkap



BURHANUDDIN, S.PI
NIP. 19691008 199703 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Sumbawa Besar

e-mail: dislutkan@sumbawakab.go.id website: www.dko.sumbawakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. BURHANUDDIN, S.Pi
Jabatan : KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAHMAT HIDAYAT, S.Pi., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumbawa Besar, 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa,



RAHMAT HIDAYAT, S.Pi., M.T.
NIP. 19730418 200003 1 004

Pihak Pertama
Kepala Bidang Perikanan Tangkap,



H. BURHANUDDIN, S.Pi
NIP. 19691008 199703 1 006

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
BIDANG PERIKANAN TANGKAP

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Laju Produksi Perikanan Tangkap (%)	2,4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.566.780.000

Sumbawa Besar, 2025
Kepala Bidang Perikanan Tangkap


H. BURHANUDDIN, S.Pi
NIP. 19691008 199703 1 006

LAMPIRAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
BIDANG PERIKANAN TANGKAP

NO. (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)	REALISASI (5)	CAPAIAN (%) (6)	PROGRAM (7)	ANGGARAN (8)	REALISASI (9)	CAPAIAN (%) (10)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Laju Produksi Perikanan Tangkap	2,4	3,12	130,00	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.566.780.000,00	2.447.452.338,00	95,35

Sumbawa Besar, Januari 2026
Kepala Bidang Perikanan Tangkap



H. BURHANUDDIN, S.Pi
NIP. 19691008 199703 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Sumbawa Besar 84314

Tlp (0371) 21144 Fax (0371) 2629087

Laman www.dislutkan.sumbawakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAELI ZAKIYAH, S.Pi, M.T

Jabatan : KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDI DAYA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAHMAT HIDAYAT, S.Pi., M.T.

Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
SUMBAWA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

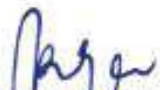
Sumbawa Besar, Januari 2025

Pihak Pertama

Kepala Bidang Perikanan Budi Daya

Pihak Kedua
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa,

RAHMAT HIDAYAT, S.Pi., M.T.
NIP. 19730418 200003 1 004

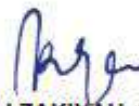

NAELI ZAKIYAH, S.Pi, M. T
NIP. 19730314 200312 2 005

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PERIKANAN BUDI DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	610.000

Sumbawa Besar, Januari 2025

Kepala Bidang Perikanan Budi Daya



NAELI ZAKIYAH, S.P.L.M.T.

NIP. 19730314 200312 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Sumbawa Besar
e-mail: dislutkan@sumbawakab.go.id website: www.dko.sumbawakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAELI ZAKIYAH, S.Pi., M.T.
Jabatan : KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAHMAT HIDAYAT, S.Pi., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumbawa Besar,

2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa,



Rahmat Hidayat
RAHMAT HIDAYAT, S.Pi., M.T.
NIP. 19730418 200003 1 004

Pihak Pertama
Kepala Bidang Perikanan Budidaya,



NAELI ZAKIYAH S.Pi., M.T
NIP. 19730314 200312 2 005

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Laju Produksi Perikanan Budidaya (%)	1,9	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.631.562.500

Sumbawa Besar, 2025
Kepala Bidang Perikanan Budidaya


NAELI ZAKIYAH S.PI., M.T
NIP. 19730314 200312 2 005

LAMPIRAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Laju Produksi Perikanan Budidaya	1.90	-56,69	-2983,68	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.539.962.500,00	2.485.441.235,00	97,85

Sumbawa Besar, Januari 2026
Kepala Bidang Perikanan Budidaya



NAELI ZAKIYAH S.PI., M.T.
NIP. 19730314 200312 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Sumbawa Besar 84314

Tlp (0371) 21144 Fax (0371) 2629087

Laman www.dislutkab.sumbawakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINAR, S.Pi
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAHMAT HIDAYAT, S.Pi., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumbawa Besar, Januari 2025

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan



DINAR, S.Pi

NIP. 19681231 199603 2 021

Pihak Kedua

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa,



RAHMAT HIDAYAT, S.Pi., M.T.

NIP. 19730418 200003 1 004

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya produksi perikanan	Cakupan areal perairan umum yang terjaga kelestarian sumberdaya ikannya (%)	69,44

Sumbawa Besar, Januari 2025
Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan



DINAR, S.PI

NIP. 19681231 199603 2 021



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Sumbawa Besar
e-mail: dislurikan@sumbawakab.go.id website: www.dko.sumbawakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINAR, S.Pi
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAHMAT HIDAYAT, S.Pi., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumbawa Besar, 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa,



Rahmat Hidayat
RAHMAT HIDAYAT, S.Pi., M.T.
NIP. 19730418 200003 1 004

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengawasan Sumber
Daya Perikanan



DINAR, S.Pi
NIP. 19681231 199603 2 021

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya lokasi perairan umum yang terjaga kelestarian sumberdaya ikannya	Cakupan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang terawasi Berdasarkan Kewenangan Kabupaten (%)	74	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	37.905.000

Sumbawa Besar, 2025
Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan



DINAR, S.Pi

NIP. 19681231 199603 2 021

LAMPIRAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya lokasi perairan umum yang terjaga kelestarian sumber dayanya	Cakupan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang terawasi Berdasarkan Kewenangan Kabupaten	74	100	135,14	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	41.565.000,00	37.885.965,00	91,15

Sumbawa Besar, Januari 2026
Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan



DINAR S.PI
NIP. 19681231 199603 2 021



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Sumbawa Besar 84314
Tlp (0371) 21144 Fax (0371) 2629087
Laman www.dislutkan.sumbawakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERY SUCITRA., S.Pi
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL
PERIKANAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAHMAT HIDAYAT, S.Pi., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
SUMBAWA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumbawa Besar, Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa,


RAHMAT HIDAYAT, S.Pi., M.T.

NIP. 19730418 200003 1 004

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan



HERY SUCITRA., S.Pi

NIP. 19811226 200501 1 004

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi olahan hasil perikanan (Ton)	10.494

Sumbawa Besar, Januari 2025
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan



HERY SUCITRA., S.PI
NIP. 19811226 200501 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Sumbawa Besar
e-mail: dislutan@sumbawakab.go.id website: www.dkp.sumbawakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERY SUCITRA., S.Pi
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAHMAT HIDAYAT, S.Pi., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumbawa Besar, 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa,



RAHMAT HIDAYAT, S.Pi., M.T.
NIP. 19730418 200003 1 004

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan



HERY SUCITRA., S.Pi
NIP. 19811226 200501 1 004

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Produk Olahan Hasil Perikanan	Laju Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	242.490.189

Sumbawa Besar, 2025
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan



HERY SUCITRA, S.PI
NIP. 19811226 200501 1 004

LAMPIRAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan	Laju Produksi Olahan Hasil Perikanan	2	-8,51	-425,50	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	243.630.189,00	228.928.866,00	93,97

Sumbawa Besar, Januari 2025
Kepala Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan



HERY SUCITRA, S.PI
NIP. 19811226 2005031 1 004

Lampiran 12. Rencana Aksi dan Rencana Aksi Perubahan Pejabat Struktural Dinas
Kelautan dan Perikanan TA 2025

RENCANA AKSI PEJABAT STRUKTURAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TA 2025

Sekretariat
Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja Target	Indikator Kinerja Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Satuan Nilai	Target Indikator	Aktifitas	Anggaran	TW I		TW II		TW III		TW IV	
							Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan
1	Tercapainya Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai	84,6	Monitoring, Evaluasi, dan koordinasi Pencapaian Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	8.328.720.586	-	2.082.182.647	-	4.125.093.797	84,6	6.324.393.859	-	8.328.720.586

Sumbawa Besar,
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa,



NURHIMAH S. PL. MAP
NIP. 19710727 199703 1 004

RENCANA AKSI PEJABAT STRUKTURAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TA 2025

Bidang Perikanan Tangkap
Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator	Aktifitas	Anggaran	TW I		TW II		TW III		TW IV	
							Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	71153	Monitoring dan Evaluasi capaian Produksi perikanan tangkap	2.275.489.269	15.352,54	455.097.854	29.750,00	1.146.177.340	46.305,16	1.741.472.000	71.153,00	2.275.489.269

Sumbawa Besar,
Kepala Bidang Perikanan Tangkap

2025

H. BURHANUDDIN, S.Pi
NIP. 19691008 199703 1 006

RENCANA AKSI PEJABAT STRUKTURAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TA 2025

Bidang Perikanan Budidaya
Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator	Aktifitas	Anggaran	TW I		TW II		TW III		TW IV	
							Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan
1	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	610000	Monitoring dan Evaluasi capaian Produksi perikanan budidaya	2.136.583.500	59.189,81	427.316.700	118.379,62	1.066.259.250	185.289,84	1.550.638.875	257.347,00	2.136.583.500

Sumbawa Besar,
Kepala Bidang Perikanan Budidaya

2025



NAELI ZAKIYAH S.PI., M.T.
NIP. 19730314 200312 2 005

RENCANA AKSI PEJABAT STRUKTURAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TA 2025

Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator	Aktifitas	Anggaran	TW I		TW II		TW III		TW IV	
							Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan
1	Meningkatnya lokasi perairan umum yang terjaga kelestarian sumber daya ikannya	Cakupan perairan umum yang terjaga kelestarian sumberdaya ikannya	%	69,44	Monitoring dan Evaluasi capaian Area Perairan umum yang terjaga kelestarian sumberdaya ikannya	42.160.000	58,33%	8.432.000	61,11%	18.810.000	63,89%	28.215.000	69,44%	42.160.000

Sumbawa Besar,
Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan

2025



DINARI, S.PI
NIP. 19681231 199603 2 021

RENCANA AKSI PEJABAT STRUKTURAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TA 2025

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator	Aktifitas	Anggaran	TW I		TW II		TW III		TW IV	
							Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan
1	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Ton	10494	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Produksi olahan hasil perikanan	215.318.000	2624	43.063.600	5247	105.345.095	7870	158.017.642	10494	215.318.000

Sumbawa Besar,
Kepala Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
2025



HERY SUCITRA, S.Pi

NIP. 19811226 2005031 1 004

RENCANA AKSI PERUBAHAN PEJABAT STRUKTURAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TA 2025

Sekretariat
Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator	Aktifitas	Anggaran	TW I		TW II		TW III		TW IV	
							Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan
1	Meningkatnya Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin ASN PD	Indeks Profesionalitas ASN PD	Nilai	76	Monitoring, Evaluasi, dan koordinasi Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN	14.200.000,00	-	3.550.000	-	7.100.000	-	10.650.000	76	14.200.000
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai	84,6	Monitoring, Evaluasi, dan koordinasi Pencapaian Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	8.969.853.518,00	-	2.242.463.380	-	4.484.926.759	-	6.727.390.139	84,6	8.969.853.518
3	Meningkatnya Retribusi Daerah	Laju Realisasi Retribusi Daerah Sektor Perikanan	%	2	Monitoring, Evaluasi, dan koordinasi Pencapaian Retribusi Sektor Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	2	-

Sumbawa Besar, 2025
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa,



NURHIKMAH S. P. M. AP
NIP. 19740727 199703 1 004

RENCANA AKSI PERUBAHAN PEJABAT STRUKTURAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TA 2025

Bidang Perikanan Tangkap
Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator	Aktifitas	Anggaran	TW I		TW II		TW III		TW IV	
							Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Laju Produksi Perikanan Tangkap	%	2,4	Monitoring dan Evaluasi capaian Produksi perikanan tangkap	2.566.780.000	-	455.097.854	-	1.146.177.340	-	1.741.472.000	2,40	2.566.780.000

Sumbawa Besar,
Kepala Bidang Perikanan Tangkap

2025

H. BURHANUDDIN, S.Pi
NIP. 19691008 199703 1 006

RENCANA AKSI PERUBAHAN PEJABAT STRUKTURAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TA 2025

Bidang Perikanan Budidaya
Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator	Aktifitas	Anggaran	TW I		TW II		TW III		TW IV	
							Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan
1	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Laju Produksi Perikanan Budidaya	%	1,9	Monitoring dan Evaluasi capaian Produksi perikanan budidaya	2.485.441.235	-	427.316.700	-	1.066.259.250	-	1.550.638.875	1,90	2.485.441.235

Sumbawa Besar,
Kepala Bidang Perikanan Budidaya

2025



NAELI ZAKIYAH S.PI., M.T
NIP. 15730314 200312 2 005

RENCANA AKSI PERUBAHAN PEJABAT STRUKTURAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TA 2025

Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator	Aktifitas	Anggaran		TW I		TW II		TW III		TW IV	
								Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan
1	Meningkatnya lokasi perairan umum yang terjaga kelestarian sumber daya ikannya	Cakupan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang terawasi Berdasarkan Kewenangan Kabupaten	%	74	Monitoring dan Evaluasi capaian Areal Perairan umum yang terjaga kelestarian sumberdaya ikannya	41.565.000		-	8.432.000	-	18.810.000	-	28.215.000	74,00%	41.565.000

Sumbawa Besar, 2025
Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan



DINAB, S.PI
NIP. 19681231 199603 2 021

RENCANA AKSI PERUBAHAN PEJABAT STRUKTURAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TA 2025

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator	Aktifitas	Anggaran	TW I		TW II		TW III		TW IV	
							Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan
1	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Laju Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	2	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Produksi olahan hasil perikanan	243.630.189	-	43.063.600	-	105.345.095	-	158.017.642	2	243.630.189

Sumbawa Besar,
Kepala Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2025


HERY SUCITRA, S.Pi

NIP. 19811226 2005031 1 004

Lampiran 12. Capaian Rencana Aksi dan Rencana Aksi Perubahan Pejabat Struktural
Dinas Kelautan dan Perikanan TA 2025

CAPAIAN RENCANA AKSI PEJABAT STRUKTURAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TA 2025

Sekretariat
Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator	Aktifitas	Anggaran	KINERJA							
							TW I		TW II		TW III		TW IV	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Tercapainya Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai	84,6	Monitoring, Evaluasi, dan koordinasi Pencapaian Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	8.984.053.518,00	-	-	-	-	84,6	83,67	-	-

No	PROGRAM	Sasaran Kinerja	Indikator	Keuangan							
				TW I		TW II		TW III		TW IV	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tercapainya Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	2.082.182.647	1.960.997.221	4.125.093.797	3.579.434.339	6.324.333.859	6.021.890.683	8.984.053.518	8.637.539.915

Sumbawa Besar, Januari 2016
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa,


NURHIDAYAH S.P. M.AP
NIP. 19710727 199703 1 004

CAPAIAN RENCANA AKSI PEABAT STRUKTURAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TA. 2025

Bidang Perikanan Budidaya
Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator	Aktifitas	Anggaran	KINERJA							
							TW I		TW II		TW III		TW IV	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	610000	Monitoring dan Evaluasi capaian Produksi perikanan budidaya	2.539.962.500,00	59.189,81	60.373,60	118.379,62	123.980,78	185.289,84	192.238,20	257.347,00	253.806,41

No	PROGRAM	Sasaran Kinerja	Indikator	Keuangan							
				TW I		TW II		TW III		TW IV	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	427.316.700	20.650.000	1.066.259.250	142.145.750	1.550.638.875	775.646.599	2.539.962.500	2.485.441.235

Sumbawa Besar, Januari 2025
Kepala Bidang Perikanan Budidaya



NAELI ZAKIAH S.P.L.M.T.
NIP. 19730314 200312 2 005

CAPAIAN RENCANA AKSI PELABAT STRUKTURAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TA 2025

Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Tahun 2025

KINERJA									
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja	Target Indikator	Aktivitas	Anggaran	TW I		Realisasi
							Target	Realisasi	
1	Meningkatnya lokasi peralihan umum yang terjaga kelestarian sumber daya ikannya	Cakupan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang terawasi Berdasarkan Kewenangan Kabupaten	%	69,44	Monitoring dan Evaluasi capaian Areal Peralihan umum yang terjaga kelestarian sumberdaya ikannya	41.565.000,00	58,33%	61,11%	63,89%
							Target	Realisasi	Realisasi
							58,33%	61,11%	63,89%
									69,44%

Keuangan									
No	PROGRAM	Sasaran Kinerja	Indikator	TW I		TW II		TW III	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya lokasi peralihan umum yang terjaga kelestarian sumber daya ikannya	Cakupan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang terawasi Berdasarkan Kewenangan Kabupaten	8.432,000	5.900,000	18.810,000	9.400,000	28.215,000	18.969,040
								41.565,000	37.865,965

Sumbawa Besar, Januari 2026
Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan



DINAH, S. PI
NIP. 19081231 199003 2 021

CAPAIAN RENCANA AKSI PEJABAT STRUKTURAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TA 2025

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator	Aktivitas	Anggaran	KINERJA							
							TW I		TW II		TW III		TW IV	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Ton	10494	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Produksi olahan hasil perikanan	243.630.180.00	2.624	2.902	5.247	5.478	7.870	8.229	10.494	11.097

No	PROGRAM	Sasaran Kinerja	Indikator	KEMANGAN							
				TW I		TW II		TW III		TW IV	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	43.063.600	14.750.000	105.345.055	81.636.250	158.017.642	162.814.113	243.630.189	228.928.866

Sumbawa Besar, Januari 2026
Kepala Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan


HERY SUCITRA, S.Pi
NIP. 19811226 2005081 1 004

CAPAIAN RENCANA AKSI PERUBAHAN PELABAT STRUKTURAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TA 2025

Sekretariat
Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator	Aktifitas	Anggaran	KINERJA							
							TW I		TW II		TW III		TW IV	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin ASN PD	Indeks Profesionalitas ASN PD	Nilai	76	Monitoring, Evaluasi, dan koordinasi Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN	14.200.000,00	-	-	-	-	-	-	76	77,92
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai	84,6	Monitoring, Evaluasi, dan koordinasi Pencapaian Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	8.969.853.518,00	-	-	-	-	-	-	84,6	83,67
3	Meningkatnya Retribusi Daerah	Laju Realisasi Retribusi Daerah Sektor Perikanan	%	2	Monitoring, Evaluasi, dan koordinasi Pencapaian Retribusi Sektor Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	2	-13,18

No	PROGRAM	Sasaran Kinerja	Indikator	Keuangan							
				TW I		TW II		TW III		TW IV	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin ASN PD	Indeks Profesionalitas ASN PD	3.550.000	-	7.100.000	-	10.650.000	-	14.200.000	12.450.000
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	2.242.463.380	-	4.484.926.759	-	6.727.390.139	-	8.969.853.518	8.625.089.915
3	Program Penunjang Urusan	Meningkatnya Retribusi Daerah	Laju Realisasi Retribusi Sektor Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumbawa Besar, Januari 2026
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa,



NURHIDAYAH S.P.L. MLAP
NIP. 19710727 199703 1 004

CAPAIAN RENCANA AKSI PERUBAHAN PEJABAT STRUKTURAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TA 2025

Bidang Perikanan Budidaya
Tahun 2025

KINERJA														
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator	Aktifitas	Anggaran	TW I		TW II		TW III		TW IV	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Laju Produksi Perikanan Tangkap	%	2,4	Monitoring dan Evaluasi capaian Produksi perikanan tangkap	2.566.780.000,00	-	-	-	-	-	-	2,40	3,12

Keuangan													
No	PROGRAM	Sasaran Kinerja	Indikator	TW I		TW II		TW III		TW IV			
				Target	Realisasi	Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Laju Produksi Perikanan Tangkap	455.097.854	15.750.000	1.146.177.340	74.170.000	1.741.472.000	1.545.418.968	2.566.780.000	2.447.452.338		

Sumbawa Besar, Januari 2026
Kepala Bidang Perikanan Tangkap

H. BURHANUDDIN, S.Pi
NIP. 19651008 199703 1 006

CAPAIAN RENCANA AKSI PERUBAHAN PEJABAT STRUKTURAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TA 2025

Bidang Perikanan Budidaya
Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator	Aktifitas	Anggaran	KINERJA							
							TW I		TW II		TW III		TW IV	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		%	1,9	Monitoring dan Evaluasi capaian Produksi perikanan budidaya	2.539.902,500,00	-	-	-	-	-	-	1,90	-57

No	PROGRAM	Sasaran Kinerja	Indikator	Keuangan							
				TW I		TW II		TW III		TW IV	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Laju Produksi Perikanan Budidaya	427.316.700	20.650.000	1.006.259.250	142.145.750	1.550.638.875	776.046.599	2.539.962.500	2.485.441.235

Sumbawa Besar, Januari 2026
Kepala Bidang Perikanan Budidaya



NAELI ZAKIYAH S.P.L., M.I.
NIP. 19730314 200312 2 005

CAPAIAN RENCANA AKSI PERUBAHAN PEJABAT STRUKTURAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TA 2025

Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator	Aktifitas	Anggaran	KINERJA							
							TW I		TW II		TW III		TW IV	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya lokasi peraliran umum yang terjaga kelestarian sumber daya ikannya	Cakupan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang terawasi Berdasarkan Kewenangan Kabupaten	%	74	Monitoring dan Evaluasi capaian Areal Peraliran umum yang terjaga kelestarian sumberdaya ikannya	41.565.000,00	-	-	-	-	-	-	74,00%	100,00%

No	PROGRAM	Sasaran Kinerja	Indikator	Keuangan							
				TW I		TW II		TW III		TW IV	
				Target	Realisasi	Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya lokasi peraliran umum yang terjaga kelestarian sumber daya ikannya	Cakupan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang terawasi Berdasarkan Kewenangan Kabupaten	8.432.000	5.900.000	18.810.000	9.400.000	28.215.000	18.969.040	41.565.000	37.885.955

Sumbawa Besar, Januari 2026
Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan



DINAR S.P.I.
NIP. 19681231 199603 2 021

CAPAIAN RENCANA AKSI PERUBAHAN PEJABAT STRUKTURAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TA 2025

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator	Aktifitas	Anggaran	KINERJA							
							TW I		TW II		TW III		TW IV	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Laju Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	2	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Produksi Olahan hasil perikanan	243.630.189,00	-	-	-	-	-	-	2	-8,51

No	PROGRAM	Sasaran Kinerja	Indikator	Keuangan							
				TW I		TW II		TW III		TW IV	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Program Peningkatkan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Laju Produksi Olahan Hasil Perikanan	43.063.600	14.750.000	105.345.095	81.636.250	158.017.642	152.814.113	243.630.189	228.928.866

Sumbawa Besar, Januari 2025
Kepala Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan



HERY SUCITRA, S.Pi
NIP. 19811226 2005031 1 004